




LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN



2024

 pn.pangkalanbalai@gmail.com

 Jl. Perkantoran Pemkab, Kedondong Raya, Kec. Banyuasin III,
Kab. Banyuasin, Sumatera Selatan 30911

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2024 dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih juga diucapkan kepada semua pihak, terutama Tim Penyusun sehingga Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban kami dalam menjalankan tugas pokok selama periode 2024. Laporan ini disusun sesuai dengan Sistematika Penulisan Laporan yang ditentukan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui surat Nomor: 4506/SEK/OT1.6/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024 perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 dan juga surat dari Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 4645/KPT.W6-U/OT1.6/XII/2024 tanggal: 30 Desember 2024 Perihal: Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024.

Laporan ini menggambarkan keadaan dan perkembangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai selama Tahun 2024, yaitu keadaan organisasi peradilan secara teknis maupun non teknis, dengan harapan laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi dalam rangka meningkatkan kinerja peradilan yang lebih baik di masa yang akan datang. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini tentu saja masih jauh dari sempurna, karenanya kritik, saran dan koreksi sangat kami harapkan.

Pangkalan Balai, 22 Januari 2025

Ketua Pengadilan. Negeri Pangkalan Balai



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	II
DAFTAR ISI	III
DAFTAR TABEL	V
DAFTAR GAMBAR	VI
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PENYELESAIAN PERKARA	4
A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI	4
1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama	4
2. Keadaan Perkara Tingkat Banding	5
3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	5
4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali	5
B. PENYELESAIAN PERKARA	6
1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus	6
2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu	7
3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi Dan Pk	8
4. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Di Mediasi	8
5. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi	8
C. PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	9
1. Posbakum (Satker yang mendapat alokasi dan realisasi anggaran)	9
2. Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu	9
3. Perkara Prodeo	9
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA	10
KOMPOSISI SDM BERDASARKAN KEPANGKATAN/ GOLONGAN/ PENDIDIKAN	10
1. Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil	11
2. Sumber Daya Manusia Tenaga Honorer (PPNPN)	13
3. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial	14
4. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial	14
5. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan	15
A. Mutasi	15
B. Promosi	17

C. Pensiun	17
D. Diklat	18
BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA & PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI	20
A. Pengelolaan Keuangan	20
1. DIPA Badan Urusan Administrasi (01)	20
2. DIPA Dirjen Badilum (03)	21
B. Pengelolaan Sarana Dan Prasarana	22
1. Gedung dan Bangunan	22
2. Rumah Dinas	25
3. Kendaraan Bermotor	26
4. Fasilitas Perkantoran	26
C. Pengelolaan Teknologi Informasi	26
1. Dukungan Teknologi Informasi	27
2. Implementasi E-Court	28
3. Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Pekara (SIPP)	28
BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	30
A. Akreditasi Penjaminan Mutu	30
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	32
C. Inovasi Pelayanan Publik	37
BAB VI PENGAWASAN	39
A. Internal	41
B. Evaluasi	43
BAB VII PENUTUP	44
A. Kesimpulan	44
B. Rekomendasi	44
L A M P I R A N	46

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Tabel Keadaan Perkara Tingkat Pertama	4
Tabel 2. 2. Keadaan Perkara Tingkat Banding	5
Tabel 2. 3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	5
Tabel 2. 4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali	5
Tabel 2. 5. Sisa Perkara Pidana Yang Diputus	6
Tabel 2. 6. Sisa Perkara Perdata Yang Diputus	6
Tabel 2. 7. Perkara Pidana Yang Diputus Tepat Waktu	7
Tabel 2. 8. Perkara Perdata Yang Diputus Tepat Waktu	7
Tabel 2. 9. Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum, Banding, Kasasi, Dan PK	8
Tabel 2. 10. Perkara Perdata Yang Berhasil Di Mediasi	8
Tabel 2. 11. Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi	8
Tabel 3. 1. Statistik Pegawai Pengadilan Negeri Pangkalan Balai	10
Tabel 3. 2. Statistik Pegawai Pengadilan Negeri Pangkalan Balai (Lanjutan)	11
Tabel 3. 3. Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil	11
Tabel 3. 4. Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil (Lanjutan)	12
Tabel 3. 5. Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil (Lanjutan)	13
Tabel 3. 6. Sumber Daya Manusia Tenaga Honorer (PPNPN)	13
Tabel 3. 7. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial	14
Tabel 3. 8. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial	14
Tabel 3. 9. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan	15
Tabel 3. 10. Mutasi	15
Tabel 3. 11. Mutasi (Lanjutan)	16
Tabel 3. 12. Promosi	17
Tabel 3. 13. Pensiun	17
Tabel 3. 14. SDM Yang Mengikuti Diklat	18
Tabel 3. 15. SDM Yang Mengikuti Diklat	19
Tabel 4. 1. Realisasi Anggaran DIPA 01	21
Tabel 4. 2. Realisasi Anggaran DIPA 03	21
Tabel 4. 3. Realisasi Anggaran DIPA 03 (Lanjutan)	22
Tabel 4. 4. Gedung dan Bangunan	22
Tabel 4. 5. Gedung dan Bangunan (Lanjutan)	23
Tabel 4. 6. Gedung dan Bangunan (Lanjutan)	24
Tabel 4. 7. Gedung dan Bangunan (Lanjutan)	25
Tabel 4. 8. Rumah Dinas	25
Tabel 4. 9. Kendaraan Bermotor	26
Tabel 4. 10. Fasilitas Perkantoran	26
Tabel 4. 11. Dukungan Teknologi Informasi	27
Tabel 4. 12. Dukungan Teknologi Informasi (Lanjutan)	27
Tabel 4. 13. Implementasi E-Court	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5. 1. Lampiran Petikan Keputusan DIRJEN BADILUM	32
Gambar 5. 2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	34
Gambar 5. 3. Ruang Tamu Terbuka	35
Gambar 5. 4. Meja Posbakum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai	35
Gambar 5. 5. Jalur Difable	36
Gambar 5. 6. Banner Informasi	36
Gambar 5. 7. Mesin Antrian Pelayanan	36

BAB I

PENDAHULUAN

Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum yang salah satu prinsip pentingnya adalah jaminan penyelenggara kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Perubahan kebijakan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1970 jo. UU No. 4 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa segala urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut teknis yudisial maupun urusan organisasi, administrasi dan finansial berada satu atap di bawah Mahkamah Agung. Perubahan kebijakan tersebut membawa konsekuensi terhadap beban tugas dan tanggung jawab lembaga peradilan yang semakin luas dan komplek.

Setelah diberlakukannya Undang-undang No.4 Tahun 2004 dan Keppres No. 21 Tahun 2004, Pengadilan Negeri merupakan Pengadilan tingkat pertama memiliki tugas dan tanggung jawab yang lebih luas yang menuntut perhatian yang lebih besar terhadap tata cara dan pelaksanaan administrasi peradilan, karena bukan saja menyangkut aspek ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi perkara, tetapi juga administrasi umum yang akan memengaruhi kelancaran penyelenggaraan peradilan itu sendiri. Terkait hal tersebut di atas administrasi peradilan dapat dibedakan jenisnya dan dipisahkan penanganannya ke dalam administrasi kepaniteraan dan administrasi kesekretariatan.

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang merupakan pengadilan tingkat pertama yang bertugas menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama bagi masyarakat

para pencari keadilan dengan cakupan wilayah hukum Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai memiliki visi **“Terwujudnya Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Yang Agung”**. Dalam upaya untuk mewujudkan visi tersebut, Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah menyusun beberapa misi antara lain :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan visi, misi dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan dipertanggung-jawabkan secara periodik yang dikenal pada tahun yang sudah berjalan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I pada bagian ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan).

Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan merupakan penjabaran dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Peradilan Tingkat Pertama, Dengan demikian untuk peningkatan kinerja badan Peradilan umum perlu ditunjang oleh Sumber Daya Manusia yang Handal dan tepat guna dan juga mempunyai kualitas keterampilan individu (*skill individual*) yang baik, sehingga jalannya

suatu organisasi dapat selaras dan berkesinambungan sesuai dengan pedoman yang telah menjadi Visi dan Misi Mahkamah Agung RI.

Dalam usaha pencapaian tegaknya hukum dan keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, maka dibuatlah program kerja yang mencakup hal-hal yang bersifat teknis peradilan dan juga hal-hal yang bersifat non teknis misalnya sarana dan prasarana demi menunjang visi dan misi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. Segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai terangkum dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024.

BAB II

PENYELESAIAN PERKARA

A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Perkara yang telah ditangani oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II terdiri dari Perkara Pidana dan Perkara Perdata. Jumlah Perkara di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tahun 2024 sejak bulan Januari sampai bulan Desember 2024 adalah sebagai berikut :

1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Keadaan perkara tingkat pertama per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1. Tabel Keadaan Perkara Tingkat Pertama

NO.	KLASIFIKASI PERKARA	SISA TAHUN 2023	PERKARA MASUK TAHUN 2024	PERKARAYANG PUTUS/ CABUT TAHUN 2024	SISA PERKARA TAHUN 2024
1.	Pidana Biasa	59	415	396	78
2.	Pidana Anak	1	7	8	0
3.	Pidana Singkat	0	1	1	0
4.	Pidana Cepat	0	17	17	0
5.	Praperadilan	0	4	4	0
6.	Lalulintas	0	6724	6724	0
7.	Perdata Gugatan	15	49	46	18
8.	Perdata Bantahan	0	3	1	2
9.	Perdata Gugatan Sederhana	1	58	59	0
10.	Perdata Permohonan	3	37	39	1

2. Keadaan Perkara Tingkat Banding

Keadaan perkara tingkat banding per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2. Keadaan Perkara Tingkat Banding

NO	KLASIFIKASI PERKARA	MENGAJUKAN BANDING	PUTUS	DICABUT	BELUM PUTUS
1.	Pidana Biasa	36	42	0	12
2.	Pidana Anak	3	2	0	1
3.	Perdata Gugatan	12	8	0	5

3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Keadaan perkara tingkat kasasi per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

NO	KLASIFIKASI PERKARA	MENGAJUKAN KASASI	PUTUS	DICABUT	BELUM PUTUS
1.	Pidana Biasa	15	11	0	8
2.	Pidana Anak	1	1	0	0
3.	Perdata Gugatan	6	11	0	7

4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

Keadaan perkara tingkat peninjauan kembali per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

NO	KLASIFIKASI PERKARA	MENGAJUKAN PK	PUTUS	DICABUT	BELUM PUTUS
1.	Pidana Biasa	3	2	0	2
2.	Pidana Anak	0	0	0	0
3.	Perdata Gugatan	6	3	0	3

B. PENYELESAIAN PERKARA

1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus

Jumlah sisa perkara tahun 2023 yang diputus pada tahun 2024 sebagai berikut :

a. Perkara Pidana

Tabel 2. 5. Sisa Perkara Pidana Yang Diputus

	KLASIFIKASI PERKARA	SISA PERKARA TAHUN 2023	PUTUS	SISA PERKARA TAHUN 2024
1.	Pidana Biasa	59	396	78
2.	Pidana Anak	1	8	0
3.	Pidana Singkat	0	1	0
4.	Pidana Cepat	0	17	0
5.	Praperadilan	0	4	0
6.	Lalulintas	0	6724	0

b. Perkara Perdata

Tabel 2. 6. Sisa Perkara Perdata Yang Diputus

NO	KLASIFIKASI PERKARA	SISA PERKARA TAHUN 2023	PUTUS	SISA PERKARA TAHUN 2024
1.	Perdata Gugatan	15	46	18
2.	Perdata Gugatan Sederhana	1	59	0
3.	Perdata Permohonan	3	39	1

2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu

a. Perkara Pidana

Tabel 2. 7. Perkara Pidana Yang Diputus Tepat Waktu

NO	KLASIFIKASI PERKARA	PERKARA MASUK	PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU
1.	Pidana Biasa	415	217
2.	Pidana Anak	7	8
3.	Pidana Singkat	1	1
4.	Pidana Cepat	17	17
5.	Praperadilan	4	4
6.	Lalulintas	6724	6724

b. Perkara Perdata

Tabel 2. 8. Perkara Perdata Yang Diputus Tepat Waktu

NO	KLASIFIKASI PERKARA	PERKARA MASUK	PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU
1.	Perdata Gugatan	49	45
2.	Perdata Gugatan Sederhana	58	56
3.	Perdata Permohonan	37	36

3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi Dan Pk

Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2. 9. Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum, Banding, Kasasi, Dan PK

NO	KLASIFIKASI PERKARA	YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM		
		BANDING	KASASI	PK
1.	Pidana Biasa	379	400	412
2.	Pidana Anak	4	6	7
3.	Perdata Gugatan	37	43	43

4. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Di Mediasi

Jumlah Perkara Perdata yang berhasil di mediasi tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2. 10. Perkara Perdata Yang Berhasil Di Mediasi

NO	KLASIFIKASI PERKARA	PERKARA MASUK	PERKARA YANG BERHASIL DI MEDIASI
1.	Perdata Gugatan	49	4

5. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi

Jumlah Perkara Anak yang berhasil melalui diversi tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2. 11. Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi

NO	KLASIFIKASI PERKARA	PERKARA PIDANA ANAK MASUK	PERKARA YANG BERHASIL MELALUI DIVERSI	KET
1.	Pidana Anak	7	3	Putus ditingkat Penyidik

C. PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

1. Posbakum (Satker yang mendapat alokasi dan realisasi anggaran)

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tahun 2024 mendapatkan anggaran untuk menyelenggarakan Pos Bantuan Hukum dengan anggaran sebesar Rp. 28.000.000,- (*Dua Puluh Delapan Juta Rupiah*) untuk 280 Jam Pelayanan. Untuk melaksanakan Program tersebut Pengadilan Negeri Pangkalan Balai menggandeng Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum “Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI Pangkalan Balai”

2. Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai merupakan satker yang baru dibentuk pada tahun 2018. Untuk periode 2024 Pengadilan Negeri Pangkalan Balai belum dapat melaksanakan kegiatan persidangan keliling dikarenakan ketiadaannya anggaran terkait kegiatan tersebut dalam DIPA dan Rka k/L tahun 2024.

3. Perkara Prodeo

Salah satu bentuk layanan hukum yang diberikan Pengadilan kepada masyarakat yang kurang mampu adalah perkara prodeo. Prodeo adalah pembebasan biaya perkara bagi masyarakat kurang mampu sehingga dalam berperkara di pengadilan, masyarakat kurang mampu tidak mengeluarkan biaya sama sekali. Pada pelaksanaannya prodeo terdiri dari prodeo murni dan prodeo menggunakan anggaran APBN. Pada tahun 2024 tidak tersedianya anggaran untuk Prodeo di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

KOMPOSISI SDM BERDASARKAN KEPANGKATAN/ GOLONGAN/ PENDIDIKAN

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai hingga laporan ini dibuat berjumlah 40 (empat puluh) Orang personil yang terdiri dari 5 (lima) Orang Hakim, 8 (Delapan) Orang Pejabat Struktural, 10 (sepuluh) Orang Pejabat Fungsional, 6 (enam) Orang Pelaksana, 1 (satu) orang PPPK dan 8 (delapan) Orang PPNPN. Berikut ini statistik pegawai pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2024:

Tabel 3. 1. Statistik Pegawai Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

NO.	NAMA JABATAN	JLH (ORG)	PENDIDIKAN							GOLONGAN				
			SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	
1.	Ketua	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
2.	Wakil Ketua	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
3.	Hakim	3	-	-	-	-	1	2	-	-	-	3	-	
4.	Panitera	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	
5.	Sekretaris	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	
6.	Panmud Hukum	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	
7.	Panmud Perdata	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	
8.	Panmud Pidana	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	
9.	Ka.Sub.Bag Kepegawaian dan Ortala	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	
10.	Ka.Sub.Bag Umum dan Keuangan	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	
11.	Ka.Sub.Bag Perencanaan, TI dan Pelaporan	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	
12.	Panitera Pengganti	7	-	-	-	-	3	4	-	-	-	7	-	

Tabel 3. 2. Statistik Pegawai Pengadilan Negeri Pangkalan Balai (Lanjutan)

NO.	NAMA JABATAN	JLH (ORG)	PENDIDIKAN							GOLONGAN			
			SD	SM P	SM A	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV
13.	Jurusita	3	-	-	-	2	1	-	-	-	-	3	-
14.	Jurusita Pengganti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Pelaksana	6	-	-	2	2	2	-	-	-	3	3	-
16.	PPPK	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
17.	PPNPN	8			2	2	4						
Jumlah		38	-	-	5	7	16	10	-	-	3	24	2

1. Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil

Berikut ini jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai Negeri Sipil yang ada pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2024:

Tabel 3. 3. Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil

NO	NAMA	JABATAN	PANGKAT	GOL/ RUANG	KET
1.	FITRI AGUSTINA, S.H.	Ketua	Pembina Tk. I	IV/b	
2.	VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Pembina	IV/a	
3.	HARI MUKTIYONO, S.H.	Hakim Pratama Muda	Penata Muda Tk.I	III/b	
4.	SYARIFA YANA, S.H., M.H.	Hakim Pratama Muda	Penata Muda Tk.I	III/b	
5.	AYU CAHYANI SIRAIT, S.H., M.H.	Hakim Pratama Muda	Penata Muda Tk.I	III/b	
6.	BAINAL HAKIM, S.H.	Panitera	Penata Tk.I	III/d	
7.	ANDRIANTO FACHRIZAL, S.Kom.	Sekretaris	Penata Tk.I	III/d	
8.	A HAIRUN YULASNI, S.H., M.H.	Panitera Muda Hukum	Penata Tk.I	III/d	
9.	KHOIRUL MUNAWAR, S.T., S.H., M.H.	Panitera Muda Pidana	Penata Tk.I	III/d	
10.	BENY HERLAMBANG, S.H.	Panitera Muda Perdata	Penata Tk.I	III/d	

Tabel 3. 4. Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil (Lanjutan)

NO	NAMA	JABATAN	PANGKAT	GOL/ RUANG	KET
11.	MUHAMMAD IMAN SEPTIAN, S.IP.	Kepala Sub Bagian	Penata Tk. I	III/d	
12.	MUTIARA SAPUTRI, S.E.	Kepala Sub Bagian	Penata Muda Tk. I	III/b	
13.	RAHMAT JUNIANSYAH	Kepala Sub Bagian	Penata Muda Tk.I	III/b	
14.	ISNATA TAKASURI, S.H	Panitera Pengganti	Penata Tk. I	III/d	
15.	WENNY PUSPITA SARI, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Penata	III/c	
16.	AL IHSAN ALAMSYUR, S.H.	Panitera Pengganti	Penata	III/c	
17.	BRENDY SUTRA, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Penata	III/c	
18.	YUDI ADRIAN SAPUTRA, S.H	Panitera Pengganti	Penata	III/c	
19.	MATHYAS ADINATA, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Penata	III/c	
20.	HIKMAWATI, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Penata	III/c	
21.	M. BUDIANTO, S.E	Jurusita	Penata Muda Tk. I	III/b	
22.	MELLY NORVIANA, A.Md	Jurusita	Penata Muda Tk. I	III/b	
23.	MARDHIYAN SAPUTRA, A.Md.	Jurusita	Penata Muda Tk. I	III/b	
24.	ENDANG AZHARI	Klerek – Penelaah Teknis Kebijakan	Penata Muda Tk. I	III/b	
25.	JIHAN PUTRI ZUZANGGI, S.H.	Klerek – Analisis Perkara Peradilan	Penata Muda Tk. I	III/a	

Tabel 3. 5. Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil (Lanjutan)

NO	NAMA	JABATAN	PANGKAT	GOL/ RUANG	KET
26.	ZULPAN ARYANTO	Klerek – Pengadministrasi Perkantoran	Pengatur Tk. I	II/d	
27.	DEA ANGGITA, A.Md.	Klerek – Penelaah Teknis Kebijakan	Pengatur Tk. I	II/c	
28.	PRAMUJI WIDODO, A.Md., S.E.	Klerek – Analisis Perkara Peradilan	Penata Muda	III/a	
29.	EUNIKE MAYERNI BATUBARA , A.Md. AB	Klerek – Pengelola Penanganan Perkara	Pengatur	II/c	
30.	MAHMUDAH, A.Md.A.B.	Arsiparis Pelaksana	VII	VII	

2. Sumber Daya Manusia Tenaga Honorer (PPNPN)

Berikut ini jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Tenaga Honorer (PPNPN) yang ada pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2024:

Tabel 3. 6. Sumber Daya Manusia Tenaga Honorer (PPNPN)

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	ERWANZA	Pengamanan	
2	FAISAL RIFAI, A.Md	Pengemudi	
3	ABDUL HADI	Pramubakti	
4	M. FADHIEL YUSUF, S.H.	Pramubakti	
5	M. RAMADHONI, S.H.	Pengamanan	
6	CITRA PUSPITA SARI, S.T.	Pramubakti	
7	RISKA YANTI, S.H.	Pramubakti	
8	MUHAMMAD NOUVAL DWI ADITYA, A.Md	Pramubakti	

3. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

Berikut ini jumlah Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial yang ada pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2024:

Tabel 3. 7. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

NO	JABATAN	PRIA	WANITA	JUMLAH
1	Hakim (Ketua / Wakil)	1	4	5
2	Panitera	1	-	1
3	Panitera Muda Hukum	1	-	1
4	Panitera Muda Perdata	1	-	1
5	Panitera Muda Pidana	1	-	1
6	Panitera Pengganti	4	3	7
7	Jurusita	2	1	3
Jumlah		12	9	21

4. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial

Berikut ini jumlah Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial yang ada pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2024:

Tabel 3. 8. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial

NO	JABATAN	PRIA	WANITA	JUMLAH
1	Sekretaris	1	-	1
2	Kasubag Umum dan Keuangan	1	-	1
3	Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	-	1	1
4	Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan	1	-	1
5	Pelaksana	3	3	6
6	PPPK	-	1	1
7	Tenaga Honorar (PPNPN)	6	2	8
Jumlah		10	9	19

5. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan

Berikut ini jumlah Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pangkat, dan Golongan yang ada pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2024:

Tabel 3. 9. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan

NO	Golongan	PRIA	WANITA	JUMLAH
1	Golongan IV	-	2	2
2	Golongan III	16	8	24
3	Golongan II	1	2	3
4	Golongan I	-	-	-
5	PPPK	-	1	1
6	Tenaga Honorer (PPNPN)	6	2	8
Jumlah		23	15	38

A. Mutasi

Selama tahun 2024 terdapat beberapa mutasi Hakim dan pegawai baik mutasi masuk maupun mutasi keluar, mutasi tersebut antara lain sebagai berikut:

Tabel 3. 10. Mutasi

NO.	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KET.
1.	NOFITA DWI WAHYUNI, S.H., M.H.	Ketua PN Pangkalan Balai Klas II	Wakil Ketua PN Sekayu Klas IB	Mutasi Keluar
2.	VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H., M.H.	Hakim PN Pematang Siantar Klas IB	Wakil Ketua PN Pangkalan Balai Klas II	Mutasi Masuk
3.	ERWIN TRI SURYA ANANDAR, S.H., M.H.	Hakim PN Pangkalan Balai Klas II	Hakim PN Pangkalan Bun Klas IB	Mutasi Keluar
4.	AGEWINA, S.H., M.H.	Hakim PN Pangkalan Balai Klas II	Hakim PN Semarapura Klas II	Mutasi Keluar

Tabel 3. 11. Mutasi (Lanjutan)

NO.	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KET.
5.	WARNO, S.H.	Panitera PN Pangkalan Balai Klas II	Panitera PN Kendal Klas IB	Mutasi Keluar
6.	BAINAL HAKIM, S.H.	Panitera PN Lahat Klas II	Panitera PN Pangkalan Balai Klas II	Mutasi Masuk
7.	ARIF BUDIMAN JAYA ANUGRAH, S.H., M.H.	Panitera Muda Perdata PN Pangkalan Balai Klas II	Panitera Muda Pidana PN Muara Enim Klas IB	Mutasi Keluar
9.	BENY HERLAMBANG, S.E.	Panitera Muda Hukum PN Prabumulih Klas II	Panitera Muda Perdata PN Pangkalan Balai Klas II	Mutasi Masuk
10.	PRAMUJI WIDODO, S.E.	Klerek - Pengelola Penanganan Perkara PN Marisa Klas II	Klerek - Pengelola Penanganan Perkara PN Pangkalan Balai	Mutasi Masuk

B. Promosi

Selama tahun 2024 terdapat beberapa Hakim dan pegawai yang promosi jabatan, antara lain sebagai berikut :

Tabel 3. 12. Promosi

NO.	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KET.
1.	NOFITA DWI WAHYUNI, S.H., M.H.	Ketua PN Pangkalan Balai Klas II	Wakil Ketua PN Sekayu Klas IB	Promosi
2.	FITRI AGUSTINA, S.H.	Ketua PN Pangkalan Balai Klas II	Ketua PN Pangkalan Balai Klas II	Promosi
3.	ERWIN TRI SURYA ANANDAR, S.H., M.H.	Hakim PN Pangkalan Balai Klas II	Hakim PN Pangkalan Bun Klas IB	Promosi
4.	ERWIN TRI SURYA ANANDAR, S.H., M.H.	Hakim PN Pangkalan Balai Klas II	Hakim PN Pangkalan Bun Klas IB	Promosi
5.	WARNO, S.H.	Panitera PN Pangkalan Balai Klas II	Panitera PN Kendal Klas IB	Promosi
6.	ARIF BUDIMAN JAYA ANUGRAH, S.H., M.H.	Panitera Muda Perdata PN Pangkalan Balai Klas II	Panitera Muda Pidana PN Muara Enim Klas IB	Promosi

C. Pensiun

Dalam kurun waktu dari Januari s.d. Desember 2023 tidak ada baik itu hakim maupun non-hakim yang pensiun.

Tabel 3. 13. Pensiun

NO	NAMA	JABATAN	PANGKAT GOL/RUANG	KET.
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

D. Diklat

Pada tahun 2024 terdapat orang yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan diantaranya:

Tabel 3. 14. SDM Yang Mengikuti Diklat

NO	NAMA	Diklat Yang Diikuti	Tanggal Kegiatan
1.	M. BUDIANTO, S.E., S.H.	Pelatihan Kompetensi PBJ Level 1 MOOC Batch 1-2024	15 Januari 2024 s.d. 29 Februari 2024
2.	ANDRIANTO FACHRIZAL, S.Kom.	Pelatihan SPIP Integratif Gelombang II Tahun 2024	10 Juni 2024 s.d. 14 Juni 2024
3.	M. BUDIANTO, S.E., S.H.	Pelatihan Program PJJ Pejabat Pembuat Komitmen	7 Oktober 2024 s.d. 11 Oktober 2024
4.	NOFITA DWI WAHYUNI, S.H., M.H.	Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif di lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2024	12 Agustus 2024 s.d. 14 Agustus 2024
5.	SYARIFA YANA, S.H., M.H.	Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif di lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2024	12 Agustus 2024 s.d. 14 Agustus 2024
6.	AYU CAHYANI SIRAIT, S.H., M.H.	Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif di lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2024	12 Agustus 2024 s.d. 14 Agustus 2024
7.	FITRI AGUSTINA, S.H.	Pelatihan Pendamping Bahasa Isyarat bagi Petugas PTSP	9 September 2024
8.	EUNIKE MAYERNI BATUBARA, A.Md.A.B.	Pelatihan Pendamping Bahasa Isyarat bagi Petugas PTSP	9 September 2024
9.	RAHMAT JUNIANSYAH	Pelatihan Online Manajemen Pengelolaan Barang Milik Negara Natch V Bekerjasama dengan Diklat PKN BPK RI Tahun Anggaran 2024	4 November 2024 s.d. 6 November 2024

Tabel 3. 15. SDM Yang Mengikuti Diklat

NO	NAMA	Diklat Yang Diikuti	Tanggal Kegiatan
10.	EUNIKE MAYERNI BATUBARA, A.Md.A.B.	Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengelolaan BMN di 4 (Empat) lingkungan Badan Peradilan Mahkamah Agung RI	19 November 2024
11.	FITRI AGUSTINA, S.H.	Kegiatan Rapat Koordinasi Sistem Pengawasan Bidang di Pengadilan Tingkat Pertama sewilayah hukum Sumatera Selatan, Lampung dan Bangka Belitung	27 November 2024 s.d. 29 November 2024

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA & PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. Pengelolaan Keuangan

Anggaran keuangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau sering dikenal dengan DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran). Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tahun 2024 memiliki 2 (dua) DIPA, yakni DIPA Badan Urusan Administrasi dengan Nomor: SP DIPA 005.01.2.401909/2024 dengan total pagu DIPA Awal sebesar Rp. 3.095.749.000 (*Tiga Miliar Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) yang mana terdapat penambahan anggaran dari pusat untuk penambahan Gaji dan Tunjangan dan Operasional dan Pemeliharaan Kantor menjadi Rp. 4.805.749.000 (*Empat Miliar Delapan Ratus Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) dan DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: SP DIPA- 005.03.2.402017/2024 dengan total pagu awal sebesar Rp. 171.800.000 (*Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*) dengan pagu akhir Rp. 169.310.000 (*Seratus Enam Puluh Sembilan Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*)

1. DIPA Badan Urusan Administrasi (01)

DIPA Badan Urusan Administrasi meliputi anggaran belanja gaji pegawai, belanja barang Operasional, Belanja Barang Non Operasional dan belanja modal. Berikut disajikan secara rinci anggaran pada tahun 2024.

- Realisasi Anggaran DIPA 01

Tabel 4. 1. Realisasi Anggaran DIPA 01

Kode	Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa	%
EBA.994	Layanan Perkantoran				
001	Gaji dan Tunjangan	3.442.501.000	3.392.375.051	50.125.949	98.54
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.363.248.000	1.336.08.545	27.229.455	98.00
	TOTAL	4.805.749.000	3.392.375.051	77.355.404	98,39

2. DIPA Dirjen Badilum (03)

DIPA Dirjen Badilum meliputi anggaran belanja Pos Bantuan Hukum dan Penyelesaian perkara di tingkat pertama. Berikut disajikan secara rinci anggaran pada tahun 2024.

- Realisasi Anggaran DIPA 03

Tabel 4. 2. Realisasi Anggaran DIPA 03

KODE	URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA	%
BCA.U03	PERKARA PIDANA YANG DISELESAIKAN DITINGKAT PERTAMA DI WILAYAH BARAT				
051	Pendaftaran Berkas Perkara	71.315.000	71.068.845	246.155	99.65
052	Penetapan Hari Sidang	90.000	80.000	10.000	88.89
053	Pengiriman Surat Penahanan Dan Perpanjangan Penahanan	19.300.000	18.932.240	367.760	98.09
055	Pengiriman Petikan/ Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa	16.720.000	16.456.750	263.250	98.43
056	Minutasi/ Upaya Hukum	24.585.000	24.569.000	16.000	99.93

Tabel 4. 3. Realisasi Anggaran DIPA 03 (Lanjutan)

KODE	URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA	%
057	Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama	7.100.000	6.666.940	433.060	93.90
058	Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama	2.200.000	1.771.070	428.930.	80.50
QBA.032	Layanan Pos Bantuan Hukum Perseorangan				
051	Pos Bantuan Hukum	28.000.000	28.000.000	0	100.00
	TOTAL	169.310.000	167.544.841	1.765.159	98.96

B. Pengelolaan Sarana Dan Prasarana

Pengelolaan sarana dan prasarana adalah kegiatan mengendalikan, menyelenggarakan, mengurus, menjalankan dan memanfaatkan sarana dan prasarana agar tetap dalam kondisi yang baik sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Sarana dan prasarana yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Balai meliputi Gedung dan Bangunan, Tanah, Kendaraan Bermotor serta fasilitas perkantoran.

1. Gedung dan Bangunan

Tabel 4. 4. Gedung dan Bangunan

No.	Jenis Sarana	Uraian	Keterangan
1	GEDUNG KANTOR	Tanah Gedung Kantor	Sertifikat
		Bangunan Gedung Kantor	Sudah Menempati Kantor Baru Per 05 Desember 2022
2	RUANG KERJA	Ruang Ketua	Ada
		Ruang Wakil Ketua	Ada
		Ruang Hakim	Ada
		Ruang Panitera	Ada
		Ruang Panitera Muda	Ada
		Ruang Panitera Pengganti	Ada

Tabel 4. 5. Gedung dan Bangunan (Lanjutan)

No.	Jenis Sarana	Uraian	Keterangan
		Ruang Juru Sita dan Juru Sita Pengganti	Ada
		Ruang Sekretaris	Ada
		Ruang Kepala Sub Bagian	Ada
		Ruang Jaksa Penuntut Umum	Ada
		Ruang Penasihat Hukum	Ada
		Ruang Rapat	Ada
		Ruang Perpustakaan	Ada
		Ruang Arsip	Ada
		Ruang Gudang	Ada
		Ruang Server	Ada
		Ruang Toilet Pegawai	Ada
		Ruang Toilet Pegawai Hakim	Ada
		Ruang Tamu Terbuka	- Terdapat pada Bagian Depan Gedung - Ruang Terbuka (Tidak Tertutup) - Sesuai dengan SE Dirjen Badilum Nomor 1/DJU/SE/V/2012 Tentang Penyediaan Ruang Tamu Terbuka Pada Pengadilan Negeri Seluruh Indonesia
3	SARANA LINGKUNGAN GEDUNG KANTOR	Pagar Keliling	Ada
		Pos Jaga	Ada
		Tempat Parkir Kendaraan	Ada
		Akses Jalan	- Pengerasan Jalan Menggunakan Cor Beton
		Taman	- Dilengkapi dengan Bunga dan Pohon Hias
		Akses Difabel	- Terdapat jalur Khusus untuk penyandang disabilitas - Terdapat Step (Ram) pada Lobi Kantor untuk penyandang disabilitas

Tabel 4. 6. Gedung dan Bangunan (Lanjutan)

No.	Jenis Sarana	Uraian	Keterangan
			- yang menggunakan Kursi Roda
		Kamera Keamanan (CCTV)	- Terdapat 32 Titik Kamera CCTV <i>Full HD</i> - 2 Titik tambah Kamera CCTV <i>Full HD</i> dari Mahkamah Agung pada PTSP dan R. Sidang Utama
4	RUANG PELAYANAN	Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	- Terletak di Bagian Gedung Kantor (Lobi Gedung) - Dilengkapi Dengan Pendingin Udara (AC) - Dilengkapi Dengan Media Informasi - Dilengkapi Dengan Komputer Untuk Proses Pelayanan - Dilengkapi Dengan Kursi Tunggu - Dilengkapi Dengan WIFI untuk Pengguna Layanan - Dilengkapi Dengan <i>Charger Box</i>
		Ruang Sidang	- Terdapat 4 Ruang Sidang (Ruang Sidang Utama, Ruang Sidang Pidana, Ruang Sidang Perdata dan Ruang Sidang Anak - Dilengkapi Dengan Pendingin Udara (AC) Central. - Dilengkapi Dengan sarana dan Prasarana Ruang Sidang Seperti mebel, Bendera, Lambang Garuda, Palu Sidang dan Lain-lain - Dilengkapi dengan Peralatan Sidang Online
		Ruang Tunggu Sidang	- Dilengkapi Dengan Televisi - Dilengkapi Dengan Media Informasi - Dilengkapi Dengan Kursi Tunggu - Dilengkapi Dengan <i>Free</i> WIFI untuk Pengunjung Sidang - Dilengkapi Dengan Kursi Roda Untuk Penyandang Disabilitas
		Ruang Tunggu Ramah Anak	Ada

Tabel 4. 7. Gedung dan Bangunan (Lanjutan)

No.	Jenis Sarana	Uraian	Keterangan
		Ruang Tunggu PK, Bapas, Penasihat Hukum dan Pekerjaan Sosial	Ada
		Ruang Posbakum	Ada dibagian Lobby Depan
		Ruang Tahanan Pria	- Dilengkapi Dengan Toilet - Dilengkapi Dengan Perlengkapan Ibadah
		Ruang Tahanan Wanita	- Dilengkapi Dengan Toilet - Dilengkapi Dengan Perlengkapan Ibadah
		Ruang Mediasi	Ada
		Ruang Kesehatan	Ada
		Ruang Diversi	Ada
		Ruang Teleconference	Ada
		Ruang Laktasi	Ada
		Toilet Umum Pria	Ada
		Toilet Umum Wanita	Ada
		Toilet Khusus Difabel	Ada
		Mushallah	Ada

2. Rumah Dinas

Tabel 4. 8. Rumah Dinas

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Ket
			B	RR	RB	
1.	Rumah Dinas Ketua	0				
2.	Rumah Dinas Wakil Ketua	0				
3.	Rumah Dinas Hakim	0				
4.	Rumah Dinas Panitera	0				
5.	Rumah Dinas Sekretaris	0				

3. Kendaraan Bermotor

Tabel 4. 9. Kendaraan Bermotor

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Ket
			B	RR	RB	
Kendaraan Bermotor Roda 4						
1.	Wuling Cortez	1	1			
2.	Mitsubishi XPander	1	1			Sewa
3.	Nissan X-Trail	3		3		Hibah Pemda
Kendaraan Bermotor Roda 2						
1.	Honda Vario	1	1			
2.	Kawasaki Trail	1	1			

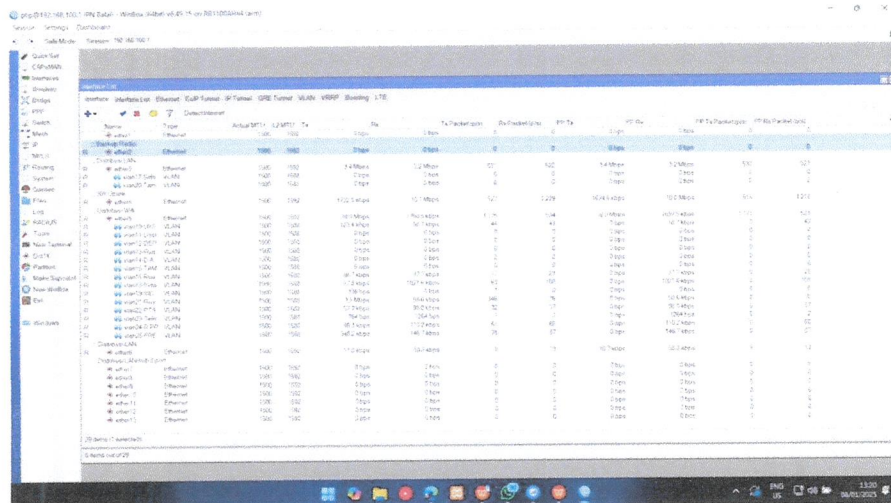
4. Fasilitas Perkantoran

Tabel 4. 10. Fasilitas Perkantoran

No	Uraian	Jumlah	Ket
1.	AC Split	6	Unit
2.	UPS	5	Unit
3.	PC	28	Unit
4.	Laptop	15	Unit
5.	Printer	20	Unit
6.	Genset 200 Kva	1	Unit

C. Pengelolaan Teknologi Informasi

Dukungan penerapan teknologi informasi yang dilakukan pada tahun 2024 dengan menggandeng pihak ketiga sebagai penyedia jasa yaitu Sriwijaya Internet Service (SIS) dengan spesifikasi layanan antara lain pengadaan jaringan Internet *dedicated* 1:1 dengan *Bandwidth* sebesar 100 Mbps. Pengadilan Negeri Pangkalan Balai juga mendapat pengadaan laptop bagi hakim dan sewa mesin fotokopi guna mendukung *E-Court*.



Gambar 4. 1. Test Mbps Melalui Mikrotik

1. Dukungan Teknologi Informasi

Tabel 4. 11. Dukungan Teknologi Informasi

No	Uraian	Jumlah	Ket
1.	Jaringan	1	Dedicated 1:1 100 Mbps, Fiber
2	Penyedia Jasa	1	SIS (Sriwijaya Internet Service)
3	Server	2	1 (satu) Server Utama, 1 (satu) Server cadangan
4.	Rak Server	2	1 (satu) Rak Server diperuntukkan untuk Utama dan cadangan, 1 (satu) diperuntukkan untuk Jaringan Mikrotik danlainnya
5.	UPS	1	Server SIPP & perangkat komputer lainnya
6.	Komputer Jaringan Lainnya	2	
7.	Router	3	
8.	Hub	1	
9.	Televisi	1	

Tabel 4. 12 Dukungan Teknologi Informasi (Lanjutan)

No	Uraian	Jumlah	Ket
10.	Monitor	2	
11.	Closed Circuit Television (CCTV)	3	

2. Implementasi E-Court

Penerapan Electronic Court atau sering dikenal dengan istilah *E-Court* pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah diterapkan. Hal tersebut merupakan wujud dari komitmen bersama Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dalam mensukseskan program Mahkamah Agung RI. Pada tahun 2024 perkara yang didaftarkan melalui ecourt adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 13. Implementasi E-Court

No	Uraian	Daftar Melalui E-Court	Sepakat E-Court
1.	Gugatan/ Perlawanan/ Bantahan	50	48
2.	Permohonan	37	37
3.	Gugatan Sederhana	58	55

3. Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

Untuk periode Januari sampai dengan Desember 2024 dengan kategori Seluruh Pengadilan, 501 - 1000 Perkara, Kelas II Pengadilan Negeri Pangkalan Balai berada di peringkat ke-4 dengan nilai 971.24 (97.02%)

Evaluasi Implementasi SIPP Pengadilan Negeri

#	JUMLAH PERKARA	KELAS	PENGADILAN	KINERJA	KEPATUHAN	KELENGKAPAN	KESEJAJIAN	IMPLEMENTASI SIPP
1	147.000	2	Pengadilan Negeri Menggala	91,03%	96,93%	92,54%	98,47%	★★★★★ 97,54% (147.000)
2	404.000	2	Pengadilan Negeri Sukadana	90,24%	98,03%	94,3%	92,94%	★★★★★ 97,45% (404.000)
3	274.000	4	Pengadilan Negeri Lahat	91,22%	98,95%	94,3%	97,94%	★★★★★ 97,04% (274.000)
4	120.000	1	Pengadilan Negeri Pangkalan Balai	91,43%	99,03%	95,7%	97,9%	★★★★★ 97,02% (120.000)
5	401.000	8	Pengadilan Negeri Mugeben	94,57%	98,9%	93,7%	96,9%	★★★★★ 96,87% (401.000)
6	544.000	8	Pengadilan Negeri Sampitan	91,4%	97,2%	94,2%	97,8%	★★★★★ 96,72% (544.000)
7	101.000	8	Pengadilan Negeri Polowaci	91,9%	98,7%	93,5%	97,9%	★★★★★ 96,47% (101.000)
8	101.000	1	Pengadilan Negeri Pangkajene	97,2%	99,4%	97,5%	98,8%	★★★★★ 96,47% (101.000)
9	94.000	2	Pengadilan Negeri Trangkil	94,4%	94,8%	98,7%	98,8%	★★★★★ 96,34% (94.000)

Gambar 4. 2. Evaluasi Implementasi SIPP Pengadilan Negeri Untuk katagori Wilayah Pengadilan Tinggi Palembang, Pengadilan Negeri Pangkalan Balai berada di peringkat ke-3 dengan nilai 971.24(97.02%).

Evaluasi Implementasi SIPP Pengadilan Negeri

#	JUMLAH PERKARA	KELAS	PENGADILAN	KINERJA	KEPATUHAN	KELENGKAPAN	KESEJAJIAN	IMPLEMENTASI SIPP
1	140.000	10	Pengadilan Negeri Lubuk Linggau	96,8%	99,0%	98,8%	96,2%	★★★★★ 97,57% (140.000)
2	120.000	4	Pengadilan Negeri Lahat	91,4%	98,9%	94,9%	97,4%	★★★★★ 97,04% (120.000)
3	101.000	4	Pengadilan Negeri Pangkalan Balai	94,4%	98,2%	98,4%	98,4%	★★★★★ 97,02% (101.000)
4	100.000	10	Pengadilan Negeri Sekayu	94,7%	98,4%	94,7%	98,2%	★★★★★ 96,27% (100.000)
5	1.000	4	Pengadilan Negeri Pager Alam	98,6%	97,7%	99,0%	98,7%	★★★★★ 96,02% (1.000)
6	100.000	10	Pengadilan Negeri Baturaja	94,5%	98,5%	93,9%	98,0%	★★★★★ 95,81% (100.000)
7	100.000	10	Pengadilan Negeri Kayuagung	95,7%	98,9%	94,4%	96,7%	★★★★★ 95,77% (100.000)
8	100.000	10.11.12.13.14	Pengadilan Negeri Palembang	98,5%	98,4%	98,9%	97,2%	★★★★★ 95,42% (100.000)
9	1.000	4	Pengadilan Negeri Prabumulih	98,7%	98,4%	98,3%	97,7%	★★★★★ 94,8%

Gambar 4. 3. Evaluasi Implementasi SIPP Pengadilan Negeri Untuk versi SIPP yang dipakai terhitung Desember 2024 sudah yang paling mutakhir atau yang terbaru dari Badilum yaitu versi 5.6.4. dengan menggunakan Evaluasi Implementasi SIPP Pengadilan Negeri v3

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai selalu berupaya untuk meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat. Berikut beberapa program yang dilakukan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dalam meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat.

A. Akreditasi Penjaminan Mutu

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 142/Dju/Sk.Ot1.6/Ii/2024 Tentang Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul Dan Tangguh (Ampuh) Di Lingkungan Peradilan Umum merupakan program pembinaan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, integritas, dan manajemen pelayanan di lingkungan peradilan umum.

Ruang lingkup program sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh (AMPUH) meliputi seluruh penerapan tugas fungsi, kinerja dan pelaksanaan layanan di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sesuai Maklumat Pelayanan dan Standar Layanan yang meliputi aspek :

1. Manajemen peradilan.
2. Administrasi perkara.
3. Administrasi persidangan.
4. Administrasi umum.
5. Pelayanan publik.
6. Pengelolaan Kas
7. Pengadaan barang dan jasa
8. Pengawasan

9. Penanganan Pengaduan

yang dilaksanakan oleh :

1. Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua)
2. Hakim/ Majelis Hakim
3. Panitera
4. Sekretaris
5. Kepaniteraan Muda, yang terdiri dari:
 - a. Panitera Muda Perdata
 - b. Panitera Muda Pidana
 - c. Panitera Muda Hukum
 - d. Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)
 - e. Panitera Muda Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)
 - f. Panitera Muda Niaga
 - g. Panitera Muda Perikanan
 - h. Panitera Muda Hak Asasi Manusia (HAM)
6. Panitera Pengganti
7. Jurusita
8. Seluruh jajaran kesekretariatan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Sertifikat AMPUH diberikan kepada satuan kerja yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Predikat sertifikasi AMPUH yang dapat diraih adalah: Paripurna, Unggul, Utama, Baik, Cukup, Pengadilan Negeri Pangkalan Balai mendapatkan Predikat Utama dengan Nilai **796,18** Berdasarkan Petikan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor Nomor 1159/Dju/Sk/Ot.01.3/Xii/2024 Tentang Nilai Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul Dan Tangguh (AMPUH) Pada Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus, Kelas IA, Kelas IB Dan Kelas II Tahun 2024

PETIKAN
DAFTAR LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
NOMOR 1159/DJU/SK/OT.01.3/XII/2024
TANGGAL 11 DESEMBER 2024

NO.	NAMA PENGADILAN	TYPE	NILAI AMPUH 2024	PREDIKAT
1 s/d 116	dst.			
117	Pengadilan Negeri Pangkalan Balai	II	796,18	UTAMA
118 s/d 382	dst.			

Gambar 5. 1. Lampiran Petikan Keputusan DIRJEN BADILUM

B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah dilaksanakan pada tahun 2018 tepatnya bulan November 2018. PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. Tujuan dari PTSP ini adalah mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Serta memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme.

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah melaksanakan pelayanan kepada masyarakat melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang terdiri dari 4 (empat) layanan : layanan umum dan keuangan, pidana, perdata, dan hukum. Selain itu pada PTSP juga terdapat layanan meja informasi dan pengaduan, serta

layanan pojok e-court. PTSP pada meja umum dan keuangan bertugas menerima dan menyerahkan seluruh surat-surat yang ditujukan dan dikeluarkan kesekretariatan. PTSP pada meja kepaniteraan perdata bertugas menerima pendaftaran perkara baik permohonan, gugatan maupun gugatan sederhana tingkat pertama, banding atau kasasi dan layanan-layanan lain yang berhubungan dengan kepaniteraan perdata. PTSP pada meja kepaniteraan pidana bertugas menerima pelimpahan perkara pidana, pendaftaran perkara pidana, permohonan izin/persetujuan penggeledahan/penyitaan/pemusnahan barang bukti/perpanjangan penahanan/pembantaran dan menyerahkan permohonan yang telah ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, dan layanan-layanan lain yang berhubungan dengan kepaniteraan pidana. PTSP pada meja kepaniteraan hukum bertugas menerima permohonan pendaftaran pendirian CV/waarmaking surat-surat, pendaftaran surat kuasa/legalisasi surat, permohonan keterangan data perkara, permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara, layananan pengaduan SIWAS MARI dan layanan-layanan lain yang berhubungan dengan kepaniteraan hukum.

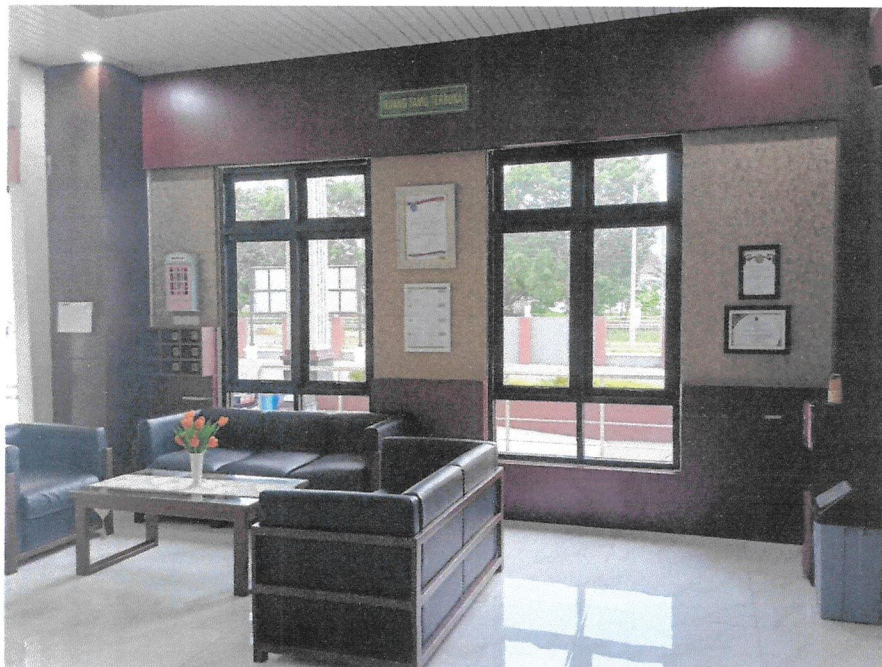
PTSP Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dilengkapi dengan sarana prasarana sebagai berikut :

1. Meja Informasi dan Pengaduan
2. Meja layanan PTSP (Umum, Pidana, Perdata, Hukum)
3. Meja Inzage
4. Kursi pengguna layanan PTSP
5. Mesin antrian pengunjung
6. Kios-K touchscreen untuk aplikasi e-court dan eraterang
7. Air mineral untuk pengunjung
8. Brosur-brosur produk layanan PTSP

9. Kotak saran dan pengaduan
10. Banner dan pamflet informasi Pengadilan
11. Meja untuk menulis bagi pengguna layanan PTSP
12. Kamera pengawas (CCTV)
13. PC untuk Survey Kepuasan Masyarakat dan Survey Persepsi Korupsi secara elektronik
14. PC dan printer scanner pada masing-masing meja pelayanan.
15. Jalur khusus bagi penyandang disabilitas
16. Kursi roda bagi penyandang disabilitas.
17. Tulisan *Braille* bagi penyandang disabilitas.
18. Toilet difabel bagi penyandang disabilitas.



Gambar 5. 2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

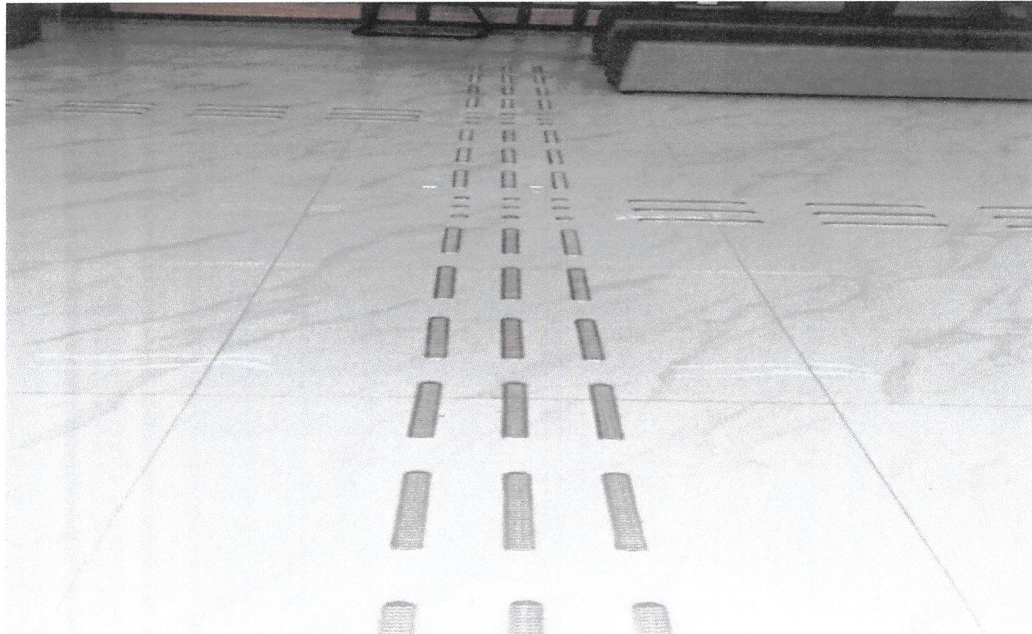


Gambar 5. 3. Ruang Tamu Terbuka

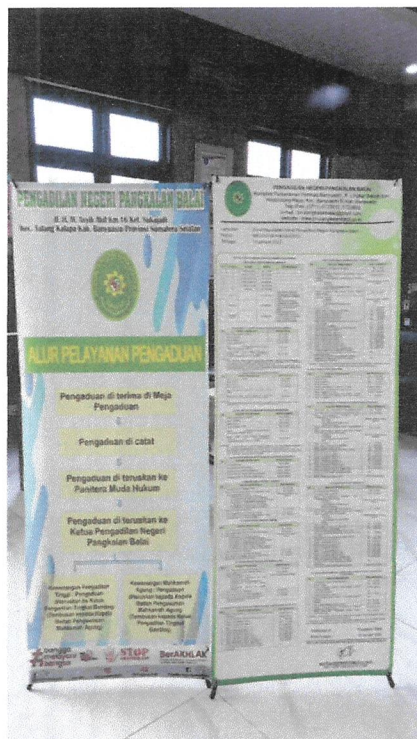
PTSP Pengadilan Negeri Pangkalan Balai juga memiliki alat survey indeks kepuasan masyarakat dan survey indeks persepsi anti korupsi juga terdapat mesin antrian pelayanan. Terdapat ruang tamu terbuka bagi para pihak dan layanan posbakum untuk konsultasi hukum bagi para pencari keadilan.



Gambar 5. 4. Meja Posbakum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai



Gambar 5. 5. Jalur Difable



Gambar 5. 6. Banner Informasi



Gambar 5. 7. Mesin Antrian Pelayanan

C. Inovasi Pelayanan Publik

Dalam rangka meningkatkan Pelayanan publik, Pengadilan Negeri Pangkalan Balai melakukan beberapa inovasi. Adapun beberapa inovasi yang dilakukan sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Astasikum (Asisten Konsultasi Hukum) yang mana memudahkan para pencari keadilan untuk berkonsultasi hukum secara gratis melalui layanan telephone
- b. Dilsah (Pengadilan Masuk Desa dan kelurahan) adalah suatu gerakan dari Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk mensosialisasikan terkait informasi dan layanan hukum lainnya bagi masyarakat di desa dan kelurahan untuk area Banyuasin
- c. Betuah (Berbincang Topik Seputar Hukum) adalah salah satu bentuk gerakan atau layanan dari Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dalam mensosialisasikan informasi atau topik seputar hukum yang mana dalam inovasi ini menggandeng stasiun pemancar radio lokal Kabupaten Banyuasin
- d. Siperkum (Informasi Perempuan Berhadapan dengan Hukum) berisi edukasi mengenai hukum terkait dengan perlindungan dan hak perempuan) yang mana di posting kedalam youtube
- e. SIAP MPP OPI MALL merupakan sarana informasi seputar pelayanan Pengadilan yang mana menggandeng pihak Pemerintah Kabupaten Banyuasin sebagai penyedia tempat (lokasi di OPI MALL Banyuasin)
- f. DILLAN (Pengadilan Masuk Sekolah dan Pesantren) merupakan suatu gerakan untuk menedukasi siswa siswi sekolah dan pesantren di wilayah Banyuasin
- g. VILADIFA (Vidio Layanan Difabel) merupakan informasi hukum yang di posting pada youtube menggunakan bahasa isyarat;

- h. Study Tour ke Pengadilan (STURLA) merupakan program inovasi dari Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang bertujuan untuk memperkenalkan kepada siswa/i SD, SMP, SMA/SMK, maupun mahasiswa/i Perguruan Tinggi mengenai apa itu Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, khususnya mengenai sejarah Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

BAB VI

PENGAWASAN

Dasar pengawasan pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai berpedoman kepada ;

1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Lembaga Peradilan;
2. Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan Buku I da Buku II (edisi revisi 2007);
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:145/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-badan Peradilan;
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung.
Terdapat 2 jenis pengawasan yakni ;

A. Pengawasan Melekat;

Yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan;

B. Pengawasan Fungsional

Yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia. Menindaklanjuti hal tersebut Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai menerbitkan surat keputusan Nomor : W6-U10/6/KP.04.6/I/2023 Tanggal : 2 JAnuari 2023 Tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan dan

Kesekretariatan pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dengan susunan sebagai berikut:

Tabel 6. 1. Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL . RUANG	KETERANGAN
1.	VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H., M.H.NIP.19790825 200602 2 002	PEMBINA TK I/ (IV/B)	KOORDINATOR PENGAWAS BIDANG
2.	HARI MUKTIYONO, S.H NIP. 19890901 201712 1 007	PENATA MUDA TK. I /(III/b)	1. HAKIM PENGAWAS BIDANG PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN 2. HAKIM PENGAWAS BIDANG UMUM DAN KEUANGAN
3.	SYARIFAH YANA, S.H. NIP. 19870115 201712 2 001	PENATA MUDA Tk. I (III/b)	1. HAKIM PENGAWAS BIDANG KEPEGAWAIAN DAN ORTALA 2. HAKIM PENGAWAS BIDANG KEPANITERAAN PIDANA 3. HAKIM PENGAWAS BIDANG KEPANITERAAN PERDATA
4.	AYU CAHYANI SIRAIT, S.H. NIP. 19930604 201712 2 002	PENATA MUDA Tk. I(III/b)	1. HAKIM PENGAWAS BIDANG HUKUM 2. HAKIM PENGAWAS PTSP

Dengan surat keputusan ini diharapkan pengawasan pada setiap bidang pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dapat berjalan sebagaimana mestinya sehingga hasil dari pengawasan dapat digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan.

A. Internal

Pengawasan internal pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dilaksanakan secara rutin baik secara langsung yakni dengan cara melakukan pemeriksaan langsung maupun secara tidak langsung dengan cara melakukan pengujian atau penilaian atas laporan atau isi dokumen. Objek dari pengawasan yang dilakukan meliputi :

1. Manajemen Peradilan
 - a. Program kerja;
 - b. Pelaksanaan/Pencapaian Target;
 - c. Pengawasan dan Pembinaan;
 - d. Kendala dan hambatan;
 - e. Faktor-faktor pendukung;
 - f. Evaluasi kegiatan.
2. Administrasi Perkara
 - a. Prosedur penerimaan perkara;
 - b. Prosedur penerimaan permohonan banding;
 - c. Prosedur penerimaan permohonan kasasi;
 - d. Prosedur penerimaan permohonan peninjauan kembali;
 - e. Prosedur penerimaan permohonan grasi;
 - f. Keuangan perkara;
 - g. Pemberkasan perkara dan kearsipan;
 - h. Pelaporan;
3. Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan
 - a. Sistem pembagian perkara dan penentuan majelis hakim;

- b. Ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara;
 - c. Minutasi perkara;
 - d. Pelaksanaan putusan (Eksekusi).
4. Administrasi Umum
- a. Kepegawaian;
 - b. Keuangan;
 - c. Inventaris;
 - d. Perpustakaan, tertib persuratan dan perkantoran.
5. Kinerja Pelayanan Publik
- a. Pengelolaan manajemen;
 - b. Mekanisme pengawasan;
 - c. Kepemimpinan;
 - d. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia;
 - e. Pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - f. Tingkat ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kebersihan dan kerapihan;
 - g. Kecepatan dan ketepatan penanganan perkara;
 - h. Tingkat pengaduan masyarakat.

Dari pengawasan yang dilakukan selama tahun 2024 terdapat berbagai temuan, selanjutnya dari temuan tersebut dilakukan klarifikasi oleh pimpinan terhadap objek pengawasan. Berbagai temuan tersebut dituangkan ke dalam laporan hasil pemeriksaan, untuk hal yang memerlukan adanya perbaikan maka Pimpinan objek pengawasan diminta untuk menandatangani kontrak kinerja bahwa ia bersedia untuk melakukan perbaikan dalam kurun waktu tertentu.

B. Evaluasi

Evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan dilakukan dilakukan setiap bulan oleh pimpinan pengadilan yakni Ketua Pengadilan dan Wakil Ketua Pengadilan melalui laporan pengawasan yang dilakukan oleh masing-masing hakim pengawas. Dari laporan pengawasan tersebut, pimpinan pengadilan dapat mengetahui kendala -kendala yang sedang dihadapi dalam melaksanakan tugas serta dapat menilai pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh hakim pengawas. Dari evaluasi pengawasan ini nantinya dapat dirumuskan solusi dan kebijakan yang akan diambil guna menyelesaikan kendala dan hambatan yang ada.



Tabel 6. 2. Rapat Evaluasi Hakim Pengawas Pengadilan Negeri Pangkalan

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sebagai Pengadilan Tingkat Pertama telah berupaya secara maksimal untuk mewujudkan visi dan misi pengadilan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang ada secara maksimal
2. Proses penyelenggaraan administrasi peradilan maupun administrasi umum telah berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), tetapi tidak berhenti sampai disitu, segenap jajaran dari pimpinan sampai kepelaksana terus berupaya meningkatkan kualitas kinerja yang lebih optimal
3. Seluruh kegiatan penyelenggaraan peradilan tidak terlepas dari pengawasan internal, Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, Wakil Ketua dan serta jajaran Hakim Pengawas pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

B. Rekomendasi

1. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan peradilan, maka perlu secara bertahap diupayakan peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai guna menunjang kelancaran, kenyamanan dan kualitas kinerja;
2. Dengan volume perkara dan pekerjaan yang terus meningkat diharapkan adanya penambahan Hakim, Pegawai dan khusus Tenaga Honorer dibidang pengamanan

yang mana selama ini seringkali dibantu oleh pemerintah setempat dalam hal ini Pemda Banyuasin;

3. Agar dilakukan pelatihan serta pembinaan secara berkelanjutan kepada seluruh aparatur baik teknis maupun non teknis yang bersumber dari Pengadilan Tinggi Palembang sebagai Korwil, Dirjen, Mahkamah Agung maupun menggandeng pihak instansi luar baik pemerintah maupun swasta sehingga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat berjalan dengan baik dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik.

LAMPIRAN

LAMPPIRAN



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon. (021) 3843348, Faksimile. (021) 3453553
Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10110 www.mahkamahagung.go.id

Nomor : 4506/SEK/OT1.6/XII/2024 Jakarta, 24 Desember 2024
Sifat : Terbatas
Lampiran : Dua Berkas
Hal : Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan
Tahun 2024

Yth. 1. Para Pejabat Eselon I Mahkamah Agung RI:
2. Para Kepala/Ketua Pengadilan Tingkat Banding
3. Para Kepala/Ketua Pengadilan Tingkat Pertama
pada Empat Lingkungan Peradilan

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik untuk terciptanya budaya kerja yang profesional, transparan, efisiensi dan efektif, maka setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan harus dilaporkan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I pada Bagian Ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan). Dihimbau kepada para Pejabat Eselon I Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya untuk Menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Unit Eselon I Mahkamah Agung Menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 berdasarkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan dari masing-masing Unit Eselon II di Bawahnya;
2. Pengadilan Tingkat Banding Menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 berdasarkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan dari masing-masing Pengadilan Tingkat Pertama di Bawahnya;
3. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 sesuai dengan *outline* terlampir;



4. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 diserahkan kepada Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI dalam bentuk *softcopy* melalui tautan bit.ly/LAP_KEG_2024 paling lambat tanggal 21 Februari 2025.

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Mahkamah Agung RI,



Sugiyanto

Lampiran
Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI
Nomor : 4506/SEK/OT1.6/XII/2024
Tanggal: 24 Desember 2024

OUTLINE LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II A. KEADAAN PERKARA DI PERADILAN UMUM/AGAMA/
MILTUN

- Keadaan Perkara Tingkat Pertama
- Keadaan Perkara Tingkat Banding
- Keadaan Perkara Tingkat Kasasi
- Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

B. PENYELESAIAN PERKARA

- Jumlah Sisa Perkara yang Diputus
- Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu
- Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK
- Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil melalui Mediasi
- Jumlah Perkara Anak yang Berhasil melalui Diversi

C. PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

- Posbakum (Satker yang mendapat alokasi dan realisasi anggaran)
- Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu
- Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

BAB III SUMBER DAYA MANUSIA

KOMPOSISI SDM BERDASARKAN KEPANGKATAN/GOLONGAN/
PENDIDIKAN

- A. Mutasi
- B. Promisi
- C. Pensiun
- D. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)

BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN
TEKNOLOGI INFORMASI

- A. Pengelolaan Keuangan
- B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana
- C. Pengelolaan Teknologi Informasi

BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

- A. Akreditasi Penjaminan Mutu
- B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
- C. Inovasi Pelayanan Publik

BAB VI PENGAWASAN

- A. Internal
- B. Evaluasi

BAB VII PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi

Catatan: Outline Laporan Pelaksanaan Kegiatan disesuaikan dengan satker masing-masing



Lampiran II
Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI
Nomor : 4506/SEK/OT1.6/XII/2024
Tanggal: 24 Desember 2024

JADWAL PENYERAHAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

NO	WAKTU	KEGIATAN
1	Januari Minggu Ketiga	<ul style="list-style-type: none">- Unit Eselon II menyerahkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan dalam bentuk <i>hardcopy</i> atau <i>softcopy</i> ke Unit Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI ;- Pengadilan Tingkat Pertama menyerahkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan dalam bentuk <i>hardcopy</i> atau <i>softcopy</i> ke Pengadilan Tingkat Banding.
2	Januari Minggu Keempat	<ul style="list-style-type: none">- Unit Eselon I mengkompilasi laporan-laporan dari masing-masing Unit Eselon II;- Pengadilan Tingkat Banding mengkompilasi laporan-laporan dari Pengadilan Tingkat Pertama di Bawahnya.
3	Februari Minggu Ketiga	<ul style="list-style-type: none">- Seluruh Unit Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung mengirim Laporan Pelaksanaan Kegiatan Unit Eselon I yang telah dikompilasi ke Badan Urusan Administrasi dalam bentuk <i>softcopy</i> melalui link bit.ly/LAP_KEG_2024;- Pengadilan Tingkat Banding mengirimkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang telah dikompilasi ke Badan Urusan Administrasi dalam bentuk <i>softcopy</i> melalui link bit.ly/LAP_KEG_2024;



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG**

Jalan Jenderal Sudirman KM. 3,5 Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Kemuning
Palembang, Sumatera Selatan, Kode Pos 30151 www.pt-palembang.go.id, info@pt-palembang.go.id

Nomor : 4645 /KPT.W6-U/OT1.6/XII/2024
Lampiran : -
Perihal : Penyusunan Laporan Pelaksanaan
Kegiatan Tahun 2024

30 Desember 2024

**Yth. Ketua Pengadilan Negeri
Se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang
di -
Tempat**

Dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *accountability* untuk terciptanya budaya kerja yang professional, transparan, efisien, dan efektif, maka setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan harus dilaporkan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku I pada Bagian Ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan).

Sejalan dengan hal tersebut, diminta kepada kepada seluruh satuan serja Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang untuk menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 dengan memperhatikan hal sebagai berikut :

1. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 sesuai dengan *outline* yang tersebut dalam Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 4506/SEK/OT1.6/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024 tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan.
2. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 diserahkan kepada Pengadilan Tinggi Palembang dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* melalui email renprog.ang.ptplg@gmail.com paling lambat **tanggal 16 Januari 2025**.

Demikian untuk dilaksanakan.



Tembusan
Sekretaris Mahkamah Agung RI



KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

NOMOR : 154/KPN.W6-U10/SK.PW1.2/XII/2024

TENTANG

**TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP) PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

- Menimbang : a. Bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Tahunan (LAPTAH), Rencana Strategis (RENSTRA), dan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan laporan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi, yang dalam penyusunannya memerlukan kecermatan dan ketelitian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan;
- b. Bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Tahunan (LAPTAH), Rencana Strategis (RENSTRA), dan Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut dapat menggambarkan secara akuntabel kinerja suatu instansi dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu dilakukan perubahan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Tahunan (LAPTAH), Rencana Strategis (RENSTRA), dan Indikator Kinerja Utama (IKU), yang terdiri dari Pembina, Ketua Tim, Sekretaris dan Anggota;
- d. Bahwa nama-nama sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini dipandang cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Tahunan (LAPTAH), Rencana Strategis (RENSTRA), dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Pangkajene-Andalena Regency.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat Pejabat/Pegawai yang namanya sebagaimana tersebut dalam lajur 2, serta Jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3, dengan kedudukan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Para Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam lajur 2 adalah Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Tahunan (LAPTAH), Rencana Strategis (RENSTRA) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai;
- KETIGA : Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Tahunan (LAPTAH), Rencana Strategis (RENSTRA) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai bertugas menghimpun bahan-bahan tersebut;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Balai

Pada tanggal : 16 Desember 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
Nomor : 154/KPN.W6-U10/SK.PW1.2/XII/2024
Tanggal : 16 Desember 2024

**TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP) PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**

No.	Nama/NIP	Jabatan	Kedudukan	Ket.
1	2	3	4	5
1.	FITRI AGUSTINA, S.H. NIP. 197908252006042002	Ketua	Pembina	
2.	BAINAL HAKIM, S.H. NIP. 196909031994031005	Panitera	Ketua Tim	
3.	ANDRIANTO FACHRIZAL, S.Kom. NIP. 197612032011011005	Sekretaris	Sekretaris	
4.	A. HAIRUN YULASNI, S.H., M.H. NIP. 197007251990031001	Panitera Muda Hukum	Anggota	
5.	KHOIRUL MUNAWAR, S.T., S.H., M.H. NIP. 197909142005021001	Panitera Muda Pidana	Anggota	
6.	BENY HERLAMBANG, S.H. NIP. 198402012006041002	Panitera Muda Perdata	Anggota	
7.	M. IMAN SEPTIAN, S.IP. NIP. 198509212011011011	Kasubbag. Perencanaan, TI dan Pelaporan	Anggota	
8.	RAHMAT JUNIANSYAH NIP. 197506201994031001	Kasubbag. Umum dan Keuangan	Anggota	
9.	MUTIARA SAPUTRI NIP. 199603222019032007	Kasubbag. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota	


KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI,

FITRI AGUSTINA



KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

NOMOR : 129/KPN.W6-U10/SK.PW1/XI/2024

TENTANG

**PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG KEPANITERAAN DAN
KESEKRETARIATAN PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

- Menimbang : a. Bahwa telah terjadi promosi dan mutasi Hakim di lingkungan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1090/DJU/SK.KP4.1.3/XI/2024 tanggal 14 Oktober 2024;
- b. Bahwa guna kelancaran dan terkontrolnya administrasi kantor, maka perlu ditunjuk Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai;
- c. Bahwa nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan; Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI TENTANG PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI.**

- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor : 104/KPN.W6-U10/SK.PW1/VIII/2024 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tanggal 5 Agustus 2024;
- KEDUA : Menetapkan susunan Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, sebagaimana tercantum dalam Daftar Lampiran ini;
- KETIGA : Memerintahkan kepada nama-nama Hakim Pengawas untuk melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pengawasan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Balai

Pada tanggal : 26 November 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
Nomor : 129/KPN.W6-U10/SK.PW1/XI/2024
Tanggal : 26 November 2024

**PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG KEPANITERAAN DAN
KESEKRETARIATAN PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**

No.	Nama/NIP	Pangkat/Gol. Ruang	Jabatan	Tugas
1.	VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H., M.H. NIP. 197901162002122001	Pembina Tk. I (IV/b)	Wakil Ketua	KOORDINATOR PENGAWAS BIDANG
2.	HARI MUKTIYONO, S.H. NIP. 198909012017121007	Penata Muda Tk. I (III/b)	Hakim	1. HAKIM PENGAWAS BIDANG UMUM DAN KEUANGAN; 2. HAKIM PENGAWAS BIDANG PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN; 3. HAKIM PENGAWAS SIPP.
3.	SYARIFA YANA, S.H., M.H. NIP. 198701152017122001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Hakim	1. HAKIM PENGAWAS BIDANG KEPANITERAAN PIDANA; 2. HAKIM PENGAWAS BIDANG KEPANITERAAN PERDATA.
4.	AYU CAHYANI SIRAIT, S.H., M.H. NIP. 199306042017122002	Penata Muda Tk. I (III/b)	Hakim	1. HAKIM PENGAWAS BIDANG KEPANITERAAN HUKUM; 2. HAKIM PENGAWAS BIDANG KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA; 3. HAKIM PENGAWAS PTSP.


KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI,
FITRI AGUSTINA



KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

NOMOR : 153/KPN.W6-U10/SK.TI1/XII/2024

TENTANG

PENUNJUKAN TIM SATUAN TUGAS SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP) PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

- Menimbang : a. Bahwa telah terjadi promosi dan mutasi Kepaniteraan di lingkungan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor : 1105/DJU/SK.KP4.1/3/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024;
- b. Berdasarkan keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif, efisien dan ekonomis merupakan bagian dari komitmen Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan peradilan;
- c. Bahwa proses peradilan yang transparan merupakan salah satu syarat untuk mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan
- d. Bahwa perlu ditetapkan Koordinator dan Tim SIPP, di lingkungan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai guna mewujudkan keterbukaan dan pelayanan informasi yang transparan seperti tersebut dalam pertimbangan angka 1 dan 2;
- e. Bahwa nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas diatas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI TENTANG PENUNJUKAN TIM SATUAN TUGAS SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP) PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI.**
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor : 118/KPN.W6-U10/SK.TI1/VIII/2024 tentang Penunjukan Tim Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tanggal 28 Agustus 2024;
- KEDUA : Menunjuk pejabat/pegawai yang tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai;
- KETIGA : Mengenai penunjukan koordinator dan petugas ini agar dapat melaksanakan tugas yang diberikan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Balai

Pada tanggal : 16 Desember 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI,



FITRI AGUSTINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
Nomor : 153/KPN.W6-U10/SK.T11/XII/2024
Tanggal : 16 Desember 2024

**PENUNJUKAN TIM SATUAN TUGAS SISTEM INFORMASI PENELUSURAN
PERKARA (SIPP) PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**

No.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL. RUANG	JABATAN
TIM KAJIAN			
1.	HARI MUKTIYONO, S.H. NIP. 198909012017121007	Penata Muda Tk. I (III/b)	Hakim
TIM TEKNIS			
1.	BAINAL HAKIM, S.H. NIP. 196909031994031005	Penata Tk. I (III/d)	Panitera
2.	A. HAIRUN YULASNI, S.H., M.H. NIP. 197007251990031001	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Muda Hukum
3.	KHOIRUL MUNAWAR, S.T., S.H., M.H. NIP. 197909142005021001	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Muda Pidana
4.	BENY HERLAMBANG, S.H. NIP. 198402012006041002	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Muda Perdata
5.	M. IMAN SEPTIAN, S.IP. NIP. 19850921 201101 1 011	Penata Tk. I (III/d)	Kasubbag. Perencanaan, TI dan Pelaporan
6.	BRENDY SUTRA, S.H., M.H. NIP. 198706292009041002	Penata (III/c)	Panitera Pengganti
7.	MATHYAS ADINATA, S.H., M.H. NIP. 198804022014031001	Penata (III/c)	Panitera Pengganti
8.	MAHMUDAH, A.Md.A.B. NIPPPK. 199810132023212007	VII	Arsiparis Pelaksana/Terampil
9.	M. NOUVAL DWI ADITYA, A.Md.	-	PPNPN
10.	ANGGA NOVRIADI, S.H.	-	PPNPN
11.	MOCHAMMAD APRIAN SAMONDRO, S.H.	-	PPNPN


KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI,

FITRI AGUSTINA



DS:7473-4678-1133-4694

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

NOMOR : SP DIPA - 005.01.2.401909/2025

A. Dasar Hukum:

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
 - Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
 - Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
 - Kode>Nama Salkes : (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
- Sebesar : Rp. 5.077.615.000 (LIMA MILIAR TUJUH PULUH TUJUH JUTA ENAM RATUS LIMA BELAS RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN

03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

005.01.WA Program Dukungan Manajemen

005.01.WA. Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni

2. PNBP

PNBP TA Berjalan

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

- Pinjaman Luar Negeri

- Hibah Luar Negeri

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN S E K A Y U

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).

2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).

3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan salkes dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA dilisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.

5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).

7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jumlah Uang

Rp. 5.077.615.000

Rp. 5.077.615.000

0

0

0

0

0

0

0

0

Jakarta, 02 Desember 2024

A. N. MENTERI KEUANGAN

DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

tttd.

ISA RACHMATARWATA

NIP. 196612301991021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-005.01.2.401909/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:7473-4678-1133-8594

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
 Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
 Kode/Nama Satker : (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Program	: 005.01.WA	Program Dukungan Manajemen	5.077.615.000	Halaman : I A. 1
Kegiatan	: 6986	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	5.077.615.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)		
	: 2. 02	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)		
	: 3. 03	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA)		
	: 4. 04	Kualitas Pelayanan Informasi Publik		
Klasifikasi Rincian Output 1	: 6986.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	5.077.315.000	
Rincian Output	: 01	EBA.962 Layanan Umum	700.000	
	: 02	EBA.994 Layanan Perkantoran	5.076.615.000	
Klasifikasi Rincian Output 2	: 6986.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	300.000	
Rincian Output	: 01	EBD.953	300.000	
		Dokumen, Laporan, Laporan, Rekomendasi		
		Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		
		Layanan		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA - 005.01.2.401909/2025
I B. SUMBER DANA**



DS:7473-4678-1133-8594

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
 Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
 Kode/Nama Satker : (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

1. Anggaran Tahun 2025		Rp.	5.077.615.000	Ket :	US\$	Pagu	0 Rp.	0	Ekuivalen Rupiah
1. Rupiah Murni		Rp.	5.077.615.000	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing (2) RPLN	US\$		0 Rp.	0	0
2. PNB		Rp.	0	b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing (2) RHLN	US\$		0 Rp.	0	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri		Rp.	0	c. Pinjaman Dalam Negeri	US\$		0 Rp.	0	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri		Rp.	0	d. Hibah Dalam Negeri	IDR		0	0	0
5. Hibah Langsung		Rp.	0	e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR		0	0	0
6. SBSN PBS		Rp.	0	f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR		0	0	0

2. Rincian Pinjaman / Hibah : (dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp. LN	Rp. Loc. Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah				

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.01.2.401909/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:7473-4678-1133-8594

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
Kode/Nama Satker : (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
401909	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI	3.683.882	1.393.733	-	-	-	5.077.615		
005.01.WA	Program Dukungan Manajemen	3.683.882	1.393.733	-	-	-	5.077.615		
6986	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	3.683.882	1.393.733	-	-	-	5.077.615		
6986.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (11.09 SUMATERA SELATAN / KAB. BANYUASIN)	3.683.882	1.393.433	-	-	-	5.077.315	11.09	
01 RM		3.683.882	1.393.433	-	-	-	5.077.315	160@	
6986.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (11.09 SUMATERA SELATAN / KAB. BANYUASIN)	-	300	-	-	-	300	11.09	
01 RM		-	300	-	-	-	300	160	
	JUMLAH	3.683.882	1.393.733	-	-	-	5.077.615		

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Mahkamah Agung RI

ftd.
Sugiyanto, S.H., M.H
NIP. 196711241992121001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

NOMOR : DIPA-005.01.2.401909/2025

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:7473-4678-1133-8594

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
 Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
 Kode/Nama Satker : (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Halaman : III. 1
 (dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH	
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	401909	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI	423.107	423.107	423.107	423.107	423.107	423.107	423.107	423.107	423.107	423.107	423.107	423.107	423.438	5.077.615
		RENCANA PENARIKAN DANA	306.973	306.973	306.973	306.973	306.973	306.973	306.973	306.973	306.973	306.973	306.973	306.973	307.179	3.683.862
		BELANJA PEGAWAI	116.134	116.134	116.134	116.134	116.134	116.134	116.134	116.134	116.134	116.134	116.134	116.259	1.393.733	
		BELANJA BARANG	423.107	423.107	423.107	423.107	423.107	423.107	423.107	423.107	423.107	423.107	423.107	423.438	5.077.615	
	005.01.WA.6986	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilatan Tingkat Banting dan Tingkat Pertama	306.973	306.973	306.973	306.973	306.973	306.973	306.973	306.973	306.973	306.973	306.973	306.973	307.179	3.683.862
		51 BELANJA PEGAWAI	116.134	116.134	116.134	116.134	116.134	116.134	116.134	116.134	116.134	116.134	116.134	116.259	1.393.733	
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	157	600	1.757	
		PERKIRAAN PENERIMAAN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	157	600	1.757	
		- PNBP (425131)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	157	600	1.757	

Jakarta, 02 Desember 2024
 Sekretaris Mahkamah Agung RI

td.
 Sugiyanto, S.H., M.H
 NIP. 196711241992121001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA - 005.01.2.401909/2025
IV A. B L O K I R



DS:7473-4678-1133-8594

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [01] Badan Urusan Administrasi
Provinsi : [11] SUMATERA SELATAN
Kode dan Nama Satker : [401909] PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

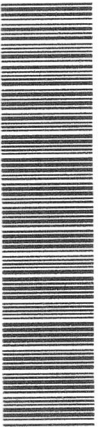
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
401909	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan		
	52 Belanja Barang	Rp.	49.900
005.01.WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	49.900
6986	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama		
6986.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	49.900
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Mahkamah Agung RI

ttd.
Sugiyanto, S.H., M.H
NIP. 196711241992121001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.01.2.401909/2025
IV B. C A T A N



DS:7473-4678-133-8584

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [01] Badan Urusan Administrasi
Provinsi : [11] SUMATERA SELATAN
Kode dan Nama Satker : [401909] PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Mahkamah Agung RI

tt.
Sugiyanto, S.H., M.H
NIP. 196711241982121001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

NOMOR : SP DIPA - 005.03.2.402017/2025

DS.4395-7860-1570-9529

A. Dasar Hukum:

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
 - Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
 - Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
 - Kode>Nama Satker : (402017) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
- Sebesar Rp. 151.990.000 (SERATUS LIMA PULUH SATU JUTA SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
- 03.04 PERADILAN
- Kode dan Nama Program dan Kegiatan :
- 005.03.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
- 005.03.BF.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

C. Sumber Dana Berasal Dari :

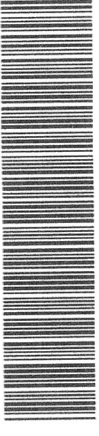
1. Rupiah Murni					
2. PNB					
PNBP TA Berjalan					
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri					
- Pinjaman Luar Negeri					
- Hibah Luar Negeri					
D. Pencairan dana dilakukan melalui :					
1. KPPN SEKAYU					
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)					
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).					
2. DIPA Petikan ini dibuat secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).					
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.					
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.					
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang terutang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.					
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).					
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.					

Jumlah Uang
Rp. 151.990.000
Rp. 151.990.000

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ftd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA - 005.03.2.402017/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:4335-7860-1570-9529

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Prov/Instansi : (11) SUMATERA SELATAN
Kode/Nama Satker : (402017) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Halaman : I A. 1

Program	:	005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	151.990.000
Kegiatan	:	1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	151.990.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum	
		2. 01	Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan tingkat banding tepat waktu	
		3. 01	Monitoring putusan yang ditindaklanjuti (eksekusi) di lingkungan Peradilan Umum	
		4. 02	Jumlah Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	
		5. 03	Jumlah Perkara yang di selesaikan melalui Sidang Gedung Pengadilan	
Klasifikasi Rincian Output 1	:	1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan	123.990.000
Rincian Output	:	01	BCA.U03 Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Barat	123.990.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	28.000.000
Rincian Output	:	01	QBA.032 Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum (PN)	28.000.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.402017/2025
I B. SUMBER DANA**



DS:4395-7860-1570-8528

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
Kode/Nama Satker : (402017) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	151.990.000	Ket :	US\$	Pagu	Rp.	0	Ekuivalen Rupiah
1. Rupiah Murni	Rp.	151.990.000	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing (2) RPLN	US\$	0	Rp.	0	0
2. PNBP	Rp.	0	b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing (2) RHLN	US\$	0	Rp.	0	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0	Rp.	0	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0	d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0	Rp.	0	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0	e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0	Rp.	0	0
6. SBSN PBS	Rp.	0	f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0	Rp.	0	0

2. Rincian Pinjaman / Hibah :

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp. LN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rp. Loc. Cost 10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.402017/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS.4395-7860-1570-9529

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
Kode/Nama Satker : (402017) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
402017	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI	-	151.990	-	-	-	151.990		
005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	151.990	-	-	-	151.990		
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-	151.990	-	-	-	151.990		
1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan (11.09 SUMATERA SELATAN / KAB. BANYUASIN)	-	123.990	-	-	-	123.990	11.09	
01 RM		-	123.990	-	-	-	123.990	160@	
1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (11.09 SUMATERA SELATAN / KAB. BANYUASIN)	-	28.000	-	-	-	28.000	11.09	
01 RM		-	28.000	-	-	-	28.000	160	
	JUMLAH	-	151.990	-	-	-	151.990		

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Ittd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196605231992121002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.402017/2025**

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
 Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
 Kode/Nama Satker : (402017) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Halaman : III. 1
 (dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH	
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	402017	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660	12.730	151.990
		RENCANA PENARIKAN DANA	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660	12.730	151.990
		BELANJA BARANG														
	005.03.BF.1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660	12.730	151.990
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660	12.730	151.990
		PERKIRAAN PENERIMAAN	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870	3.879	46.449
		- PNBP (425232)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960
		- PNBP (425233)	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356	359	4.275
		- PNBP (425239)	3.434	3.434	3.434	3.434	3.434	3.434	3.434	3.434	3.434	3.434	3.434	3.440	3.440	41.214

Jakarta, 02 Desember 2024
 Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
 NIP. 196805231992121002

Itd.

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA - 005.03.2.402017/2025
IV A. B L O K I R



DS.4395-7860-1570-9529

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [03] Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : [11] SUMATERA SELATAN
Kode dan Nama Satker : [402017] PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
402017	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan		
	52 Belanja Barang	Rp.	1.600
005.03.BF 1049	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp.	1.600
1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	1.600
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Ittd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-005.03.2.402017/2025
IV B. C A T A N



DS-4395-7860-1570-9529

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [03] Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : [11] SUMATERA SELATAN
Kode dan Nama Satker : [402017] PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Itd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025 (DIPA AWAL)

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
 UNIT KERJA (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
 ALOKASI Rp. 5,077,615,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
005.01.WA	Program Dukungan Manajemen			5,077,615,000	
6986	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama			5,077,615,000	
6986.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	2.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		5,077,315,000	

	Lokasi : KAB. BANYUASIN				
6986.EBA.962	Layanan Umum	1.0 Laporan		700,000	
051	Dukungan Manajemen Non Operasional Pengadilan			700,000	
C	Pengadaan Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel			700,000	
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel (KPPN.160-Sekayu)			700,000	RM
	- Mesin Pompa Air Dorong	1.0 UNIT	700,000	700,000	
6986.EBA.994	Layanan Perkantoran	1.0 Layanan		5,076,615,000	
001	Gaji dan Tunjangan			3,683,882,000	
A	Pembayaran gaji dan tunjangan			3,683,882,000	
511111	Belanja Gaji Pokok PNS (KPPN.160-Sekayu)			1,546,029,000	RM
	- Belanja Gaji Pokok PNS	1.0 THN	1,319,847,000	1,319,847,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	113,004,000	113,004,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	113,178,000	113,178,000	
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS (KPPN.160-Sekayu)			52,000	RM
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.0 THN	38,000	38,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	7,000	7,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	7,000	7,000	
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (KPPN.160-Sekayu)			114,934,000	RM
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.0 THN	98,514,000	98,514,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	8,210,000	8,210,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	8,210,000	8,210,000	
511122	Belanja Tunj. Anak PNS (KPPN.160-Sekayu)			31,531,000	RM
	- Belanja Tunj. Anak PNS	1.0 THN	27,063,000	27,063,000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,198,000	2,198,000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,270,000	2,270,000	
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS (KPPN.160-Sekayu)			28,140,000	RM
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS	1.0 THN	24,120,000	24,120,000	
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,010,000	2,010,000	
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,010,000	2,010,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025 (DIPA AWAL)

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
 UNIT KERJA (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
 ALOKASI Rp. 5,077,615,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511124	<u>Belanja Tunj. Fungsional PNS</u> (KPPN.160-Sekayu)			1,176,090,000	RM
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.0 THN	1,009,350,000	1,009,350,000	
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13)	1.0 THN	83,370,000	83,370,000	
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	83,370,000	83,370,000	
511125	<u>Belanja Tunj. PPh PNS</u> (KPPN.160-Sekayu)			156,140,000	RM
	- Belanja Tunjangan PPh PNS	1.0 THN	124,638,000	124,638,000	
	- Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	15,751,000	15,751,000	
	- Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	15,751,000	15,751,000	
511126	<u>Belanja Tunj. Beras PNS</u> (KPPN.160-Sekayu)			93,812,000	RM
	- Belanja Tunj Beras PNS	1.0 THN	93,812,000	93,812,000	
511129	<u>Belanja Uang Makan PNS</u> (KPPN.160-Sekayu)			421,977,000	RM
	- Belanja Uang Makan PNS	1.0 THN	421,977,000	421,977,000	
511151	<u>Belanja Tunjangan Umum PNS</u> (KPPN.160-Sekayu)			55,560,000	RM
	- Belanja Tunjangan Umum PNS	1.0 THN	50,000,000	50,000,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,780,000	2,780,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,780,000	2,780,000	
511611	<u>Belanja Gaji Pokok PPPK</u> (KPPN.160-Sekayu)			37,070,000	RM
	- Belanja Gaji Pokok PPPK	1.0 THN	31,776,000	31,776,000	
	- Belanja Gaji Pokok PPPK (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,647,000	2,647,000	
	- Belanja Gaji Pokok PPPK (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,647,000	2,647,000	
511619	<u>Belanja Pembulatan Gaji PPPK</u> (KPPN.160-Sekayu)			9,000	RM
	- Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.0 THN	7,000	7,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PPPK (gaji ke 13)	1.0 BLN	1,000	1,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PPPK (gaji ke 14)	1.0 BLN	1,000	1,000	
511621	<u>Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK</u> (KPPN.160-Sekayu)			3,704,000	RM
	- Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	1.0 THN	3,176,000	3,176,000	
	- Belanja Tunjangan Suami/Istri PPK (gaji ke 13)	1.0 BLN	264,000	264,000	
	- Belanja Tunjangan Suami/Istri PPK (gaji ke 14)	1.0 BLN	264,000	264,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025 (DIPA AWAL)

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
 UNIT KERJA (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
 ALOKASI Rp. 5,077,615,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511622	<u>Belanja Tunjangan Anak PPPK</u> (KPPN.160-Sekayu)			1,480,000	RM
	- Belanja Tunjangan Anak PPPK	1.0 THN	1,270,000	1,270,000	
	- Belanja Tunjangan Anak PPPK (gaji ke 13)	1.0 BLN	105,000	105,000	
	- Belanja Tunjangan Anak PPPK (gaji ke 14)	1.0 BLN	105,000	105,000	
511624	<u>Belanja Tunjangan Fungsional PPPK</u> (KPPN.160-Sekayu)			4,900,000	RM
	- Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1.0 THN	4,200,000	4,200,000	
	- Belanja Tunjangan Fungsional PPPK (gaji ke 13)	1.0 BLN	350,000	350,000	
	- Belanja Tunjangan Fungsional PPPK (gaji ke 14)	1.0 BLN	350,000	350,000	
511625	<u>Belanja Tunjangan Beras PPPK</u> (KPPN.160-Sekayu)			4,054,000	RM
	- Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.0 THN	3,476,000	3,476,000	
	- Belanja Tunjangan Beras PPPK (gaji ke 13)	1.0 BLN	289,000	289,000	
	- Belanja Tunjangan Beras PPPK (gaji ke 14)	1.0 BLN	289,000	289,000	
511628	<u>Belanja Uang Makan PPPK</u> (KPPN.160-Sekayu)			8,400,000	RM
	- Belanja Uang Makan PPPK	1.0 THN	8,400,000	8,400,000	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			1,392,733,000	
<i>A</i>	<i>Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran</i>			<i>466,439,000</i>	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.160-Sekayu)			395,419,000	RM
	- Biaya Penjilitan	1.0 THN	2,000,000	2,000,000	
	- Air Minum Galon	1.0 THN	6,000,000	6,000,000	
	- Retribusi Sampah	12.0 KEG	150,000	1,800,000	
	- Honorarium Sopir [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	3,931,000	47,172,000	
	- Honorarium Satpam [2 ORG x 12 BLN]	24.0 OB	3,931,000	94,344,000	
	- Honorarium Pramubakti [5 ORG x 12 BLN]	60.0 OB	3,574,000	214,440,000	
	- THR Sopir [1 ORG x 1 BLN]	1.0 OB	3,931,000	3,931,000	
	- THR Satpam [2 ORG x 1 BLN]	2.0 OB	3,931,000	7,862,000	
	- THR Pramubakti [5 ORG x 1 BLN]	5.0 OB	3,574,000	17,870,000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.160-Sekayu)			11,000,000	RM
	- Spanduk	1.0 THN	6,000,000	6,000,000	
	- Benner	1.0 THN	5,000,000	5,000,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.160-Sekayu)			60,020,000	RM
	- Biaya Keperluan sehari-hari perkantoran (pegawai 32 orang)	1.0 THN	60,020,000	60,020,000	
<i>B</i>	<i>Langganan Daya dan Jasa</i>			<i>222,000,000</i>	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025 (DIPA AWAL)

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
 UNIT KERJA (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
 ALOKASI Rp. 5,077,615,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.160-Sekayu)			189,000,000	RM
	- Lisensi Vidio Conference [1 THN x 1 KEG]	1.0 THN	3,000,000	3,000,000	
	- Langganan Internet	12.0 BLN	15,500,000	186,000,000	
521114	<u>Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</u> (KPPN.160-Sekayu)			6,000,000	RM
	- Belanja pengiriman surat dinas pos pusat	12.0 BLN	500,000	6,000,000	
522112	<u>Belanja Langganan Telepon</u> (KPPN.160-Sekayu)			12,000,000	RM
	- Langganan telpon	12.0 BLN	1,000,000	12,000,000	
522113	<u>Belanja Langganan Air</u> (KPPN.160-Sekayu)			11,000,000	RM
	- Langganan Air	12.0 BLN	916,667	11,000,000	
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.160-Sekayu)			4,000,000	RM
	- Langganan Web Hosting	1.0 THN	4,000,000	4,000,000	
C	<u>Pemeliharaan Kantor</u>			426,970,000	
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.160-Sekayu)			196,338,000	RM
	- Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Bertingkat (Sumatera Selatan)	2496.0 M2	78,102	194,942,000	
	- Pemeilharaan Rumah Genset	1.0 THN	1,396,000	1,396,000	
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.160-Sekayu)			230,632,000	RM
	- Bahan Bakar Genset [1 UT x 1 THN]	1.0 THN	8,561,000	8,561,000	
	- Pemeliharaan AC VRV Outdoor (6 unit x 2 kali)	6.0 Unit	960,150	5,760,000	
	- Pemeliharaan AC VRV Indoor (65 unit x 2 kali)	65.0 Unit	692,640	45,021,000	
	- BBM Sewa Roda 4	1.0 UT	30,000,000	30,000,000	
	- Pemeliharaan Kendaraan roda 2 (dua) [2 UNIT x 1 THN]	2.0 UT	3,000,000	6,000,000	
	- Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 (empat)	4.0 UNIT	30,000,000	120,000,000	
	- Perawatan Komputer [20 UNIT x 1 THN]	20.0 UT	219,000	4,380,000	
	- Perawatan Printer [4 UNIT x 1 THN]	4.0 UT	690,000	2,760,000	
	- Perawatan AC [6 Unit x 1 THN]	6.0 UT	750,000	4,500,000	
	- Perawatan Laptop [5 UNIT x 1 THN]	5.0 UT	730,000	3,650,000	
D	<u>Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor</u>			100,724,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025 (DIPA AWAL)

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
 UNIT KERJA (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
 ALOKASI Rp. 5,077,615,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.160-Sekayu)			44,324,000	RM
	- Pakaian Dinas PPPK [1 ORG x 1 STEL]	1.0 STEL	978,000	978,000	
	- Pakaian Dinas CPNS [5 ORG x 1 STEL]	5.0 STEL	978,000	4,890,000	
	- Pakaian Dinas Hakim [7 ORG x 1 STEL]	7.0 STEL	978,000	6,846,000	
	- Pakaian Kerja Satpam (Sumatera Selatan) [2 ORG x 1 STEL]	2.0 STEL	1,630,000	3,260,000	
	- Pakaian Kerja Pramubakti [5 ORG x 1 STEL]	5.0 STEL	813,000	4,065,000	
	- Pakaian Kerja Pengemudi [1 ORG x 1 Stel]	1.0 STEL	813,000	813,000	
	- Pakaian Dinas Pegawai [24 ORG x 1 STEL]	24.0 STEL	978,000	23,472,000	
521115	<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u> (KPPN.160-Sekayu)			56,400,000	RM
	- Honorarium Staf Pengelola [2 ORG x 12 BLN]	24.0 OB	350,000	8,400,000	
	- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	1,330,000	15,960,000	
	- Honorarium Atasan Langsung Bendahara Pengelola Pnbp [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	300,000	3,600,000	
	- Honorarium Bendahara Pengeluaran [1 OPRG x 12 BLN]	12.0 OB	470,000	5,640,000	
	- Honorarium Pejabat Penguji Tagihan Penandatanganan Spm [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	530,000	6,360,000	
	- Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	1,370,000	16,440,000	
E	<i>Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim dan Hakim Adhoc</i>			75,600,000	
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.160-Sekayu)			75,600,000	RM
	- Bantuan Sewa Rumah Dinas Hakim [5 ORG x 12 BLN]	60.0 OB	1,260,000	75,600,000	
F	<i>Pelantikan dan Sumpah Jabatan</i>			1,200,000	
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u> (KPPN.160-Sekayu)			1,200,000	RM
	- Jasa Rohaniawan [1 ORG x 4 KEG x 1 THN]	4.0 OK	300,000	1,200,000	
G	<i>Konsultasi ke Pusat/Tingkat Banding/Tingkat Pertama</i>			80,600,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.160-Sekayu)			80,600,000	A RM
	- Penginapan [4 ORG x 1 HARI x 20 KEG]	80.0 OH	207,500	16,600,000	*
	- Transportasi [4 ORG x 1 PP x 20 KEG]	80.0 OK	200,000	16,000,000	*
	- Uang Harian [4 ORG x 2 HARI x 20 KEG]	160.0 OH	300,000	48,000,000	*
H	<i>Konsultasi ke KPPN/KANWIL DJPb/KPKNL/KANWIL DJKN/BKN/BKD</i>			19,200,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.160-Sekayu)			19,200,000	A RM
	- Uang Harian [2 ORG x 2 Hari x 12 KEG]	48.0 OH	300,000	14,400,000	*
	- Penginapan [2 ORG x 1 HARI x 12 KEG]	24.0 OH	100,000	2,400,000	*
	- Transportasi [2 ORG x 1 PP x 12 KEG]	24.0 OK	100,000	2,400,000	*

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025 (DIPA AWAL)

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
 UNIT KERJA (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
 ALOKASI Rp. 5,077,615,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6986.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]	1.0 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi		300,000	
	Lokasi : KAB. BANYUASIN				
6986.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.0 Dokumen		300,000	
051	Layanan Pemantauan dan Evaluasi			300,000	
A	Dokumen Pemantauan dan Evaluasi			300,000	
521211	Belanja Bahan			300,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Cetak Bahan Pemantauan dan Evaluasi	1.0 KEG	300,000	300,000	

Catatan : 1. U = Komponen Utama
 2. P = Komponen Penunjang
 3. * = Blokir

Pangkalan Balai, 3 Desember 2024

Sekretaris


ANDRIANTO FACHRIZAL S.Kom
 NIP.197612032011011005

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025 (DIPA AWAL)

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
 UNIT KERJA (402017) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
 ALOKASI Rp. 151,990,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			151,990,000	
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			151,990,000	
1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan[Base Line]	447.0 Perkara, Berkas Perkara		123,990,000	
1049.BCA.U03	Lokasi : KAB. BANYUASIN Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Barat	447.0 Perkara		123,990,000	
051	Pendaftaran Berkas Perkara			48,985,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			48,985,000	
521211	Belanja Bahan			6,705,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Penjilitan berkas perkara	447.0 PKR	15,000	6,705,000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi			42,280,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Alat Tulis Kantor	447.0 PKR	94,587	42,280,000	
052	Penetapan hari sidang			35,760,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			35,760,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat			35,760,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Pengiriman Surat Penetapan Hari Sidang	447.0 KEG	80,000	35,760,000	
053	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan.			2,400,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			2,400,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat			2,400,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	60.0 OK	40,000	2,400,000	
054	Pemeriksaan di sidang pengadilan			20,940,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			20,940,000	
521211	Belanja Bahan			20,940,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Konsumsi Makan Terdakwa	447.0 OK	20,000	8,940,000	
	- Konsumsi Pengamanan dari Kepolisian	480.0 OK	25,000	12,000,000	
055	Pengiriman Petikan/ Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa			2,400,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			2,400,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat			2,400,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Pengiriman Petikan/Salinan Putusan	60.0 KEG	40,000	2,400,000	
056	Minutasi/Upaya hukum			6,705,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			6,705,000	
521211	Belanja Bahan			6,705,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Penjilitan Berkas Perkara	447.0 PKR	15,000	6,705,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025 (DIPA AWAL)

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
 UNIT KERJA (402017) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
 ALOKASI Rp. 151,990,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
057	Penanganan perkara banding di Pengadilan Tingkat pertama			5,600,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			5,600,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (KPPN.160-Sekayu)			2,400,000	RM
	- Pengiriman Berkas Banding	20.0 KEG	40,000	800,000	
	- Pengiriman Proses Banding Kepada Jaksa/Terdakwa	20.0 KEG	40,000	800,000	
	- Pengiriman Putusan Banding Kepada Jaksa/Terdakwa	20.0 KEG	40,000	800,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.160-Sekayu)			3,200,000	A RM
	- Pemberitahuan Putusan Banding Kepada Jaksa/Terdakwa	20.0 OK	80,000	1,600,000	*
	- Pemberitahuan Proses Banding Kepada Jaksa/Terdakwa	20.0 OK	80,000	1,600,000	*
058	Penanganan perkara kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat pertama			1,200,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			1,200,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (KPPN.160-Sekayu)			1,200,000	RM
	- Pengiriman Putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali kepada Jaksa/Terdakwa/Penasehat Hukum	5.0 KEG	80,000	400,000	
	- Pengiriman Berkas Kasasi dan PK	5.0 OK	80,000	400,000	
	- Pengiriman Proses Kasasi/PK/Kepada Jaksa/Terdakwa/Penasehat Hukum	5.0 KEG	80,000	400,000	
1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan[Base Line]	30.0 Orang		28,000,000	
1049.QBA.032	Lokasi : KAB. BANYUASIN Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum	30.0 Orang		28,000,000	
051	Pos Bantuan Hukum			28,000,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			28,000,000	
522131	Belanja Jasa Konsultan (KPPN.160-Sekayu)			28,000,000	RM
	- Honorarium Advokat Piket [2 ORG x 2 JAM x 7 HARI x 10 BLN	280.0 OJ	100,000	28,000,000	

Catatan : 1. U = Komponen Utama
 2. P = Komponen Penunjang
 3. * = Blokir

Pangkalan Balai, 3 Desember 2024

KPA-KUASA PENGGUNA ANGGARAN


 ANDRIANTO FACHRIZAL,S.Kom
 NIP.197612032011011005

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 Satuan Kerja : 401909 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Hal 1 dari 6

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024		SISA	
				Periode Lalu	Periode Ini s.d. Periode	ANGGARAN	
					%		
JUMLAH SELURUHNYA		4,805,749,000	0	4,188,605,037	4,728,393,596	98.39 %	77,355,404
WA Program Dukungan Manajemen		4,805,749,000	0	4,188,605,037	4,728,393,596	98.39 %	77,355,404
WA.6986 Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama		4,805,749,000	0	4,188,605,037	4,728,393,596	98.39 %	77,355,404
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal		4,805,749,000	0	4,188,605,037	4,728,393,596	98.39 %	77,355,404
EBA.994 Layanan Perkantoran		4,805,749,000	0	4,188,605,037	4,728,393,596	98.39 %	77,355,404
001 Gaji dan Tunjangan		3,442,501,000	0	3,136,587,804	3,392,375,051	98.54 %	50,125,949
001.0A Pembayaran gaji dan tunjangan		3,442,501,000	0	3,136,587,804	3,392,375,051	98.54 %	50,125,949
511111 Belanja Gaji Pokok PNS		1,554,892,000	0	1,424,903,000	1,533,930,300	98.65 %	20,961,700
000001. Belanja Gaji Pokok PNS		1,335,202,000	0	1,208,282,800	1,317,310,100	98.66 %	17,891,900
000002. Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)		108,495,000	0	108,430,400	108,430,400	99.94 %	64,600
000003. Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)		108,195,000	0	108,189,800	108,189,800	100.00	5,200
000004. Tambahan Kenaikan Gaji		3,000,000	0	0	0	0.00 %	3,000,000
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS		26,000	0	19,827	1,226	80.97 %	4,947
000005. Belanja Pembulatan Gaji PNS		22,000	0	15,977	1,226	78.20 %	4,797
000006. Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)		2,000	0	1,918	0	95.90 %	82
000007. Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)		2,000	0	1,932	0	96.60 %	68
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS		113,378,000	0	98,259,380	7,487,910	93.27 %	7,630,710
000008. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS		98,514,000	0	83,396,930	7,487,910	92.26 %	7,629,160
000009. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)		7,129,000	0	7,128,150	0	99.99 %	850
000010. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)		7,735,000	0	7,734,300	0	99.99 %	700
511122 Belanja Tunj. Anak PNS		31,548,000	0	29,104,644	2,211,066	99.26 %	232,290
000011. Belanja Tunj. Anak PNS		27,063,000	0	24,637,544	2,211,066	99.21 %	214,390
000012. Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)		2,220,000	0	2,219,652	0	99.98 %	348
000013. Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)		2,265,000	0	2,247,448	0	99.23 %	17,552
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS		28,140,000	0	26,130,000	2,010,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 Satuan Kerja : 401909 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Hal 2 dari 6

	Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024			SISA ANGGARAN	
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode %		
000014.	Belanja Tunjangan Struktural PNS	24,120,000	0	22,110,000	2,010,000	24,120,000	100.00	0
000015.	Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13)	2,010,000	0	2,010,000	0	2,010,000	100.00	0
000016.	Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14)	2,010,000	0	2,010,000	0	2,010,000	100.00	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,186,640,000	0	1,084,410,000	102,170,000	1,186,580,000	99.99 %	60,000
000017.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1,019,850,000	0	917,670,000	102,170,000	1,019,840,000	100.00	10,000
000018.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13)	83,395,000	0	83,370,000	0	83,370,000	99.97 %	25,000
000019.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 14)	83,395,000	0	83,370,000	0	83,370,000	99.97 %	25,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	131,080,000	0	121,557,705	4,268,837	125,826,542	95.99 %	5,253,458
000020.	Belanja Tunjangan PPh PNS	84,638,000	0	75,165,445	4,268,837	79,434,282	93.85 %	5,203,718
000021.	Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13)	23,291,000	0	23,283,613	0	23,283,613	99.97 %	7,387
000022.	Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 14)	23,151,000	0	23,108,647	0	23,108,647	99.82 %	42,353
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	82,056,000	0	76,258,260	5,793,600	82,051,860	99.99 %	4,140
000023.	Belanja Tunj Beras PNS	82,056,000	0	76,258,260	5,793,600	82,051,860	99.99 %	4,140
511129	Belanja Uang Makan PNS	241,982,000	0	212,618,000	17,741,000	230,359,000	95.20 %	11,623,000
000024.	Belanja Uang Makan PNS	241,982,000	0	212,618,000	17,741,000	230,359,000	95.20 %	11,623,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	15,180,000	0	13,495,000	1,095,000	14,590,000	96.11 %	590,000
000025.	Belanja Tunjangan Umum PNS	13,360,000	0	11,675,000	1,095,000	12,770,000	95.58 %	590,000
000026.	Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)	910,000	0	910,000	0	910,000	100.00	0
000027.	Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)	910,000	0	910,000	0	910,000	100.00	0
5111611	Belanja Gaji Pokok PPPK	40,494,000	0	37,164,400	2,858,800	40,023,200	98.84 %	470,800
000028.	Belanja Gaji Pokok PPPK	34,776,000	0	31,446,800	2,858,800	34,305,600	98.65 %	470,400
000029.	Belanja Gaji Pokok PPPK (gaji ke 13)	2,859,000	0	2,858,800	0	2,858,800	99.99 %	200
000030.	Belanja Gaji Pokok PPPK (gaji ke 14)	2,859,000	0	2,858,800	0	2,858,800	99.99 %	200
5111619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	9,000	0	1,128	88	1,216	13.51 %	7,784
000031.	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	7,000	0	968	88	1,056	15.09 %	5,944
000032.	Belanja Pembulatan Gaji PPPK (gaji ke 13)	1,000	0	80	0	80	8.00 %	920

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 Satuan Kerja : 401909 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Hal 3 dari 6

	Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024		SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	
511621	000033. Belanja Pembulatan Gaji PPPK (gaji ke 14)	1,000	0	80	0	920
	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	134,000	0	0	0	134,000
	000034. Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	6,000	0	0	0	6,000
	000035. Belanja Tunjangan Suami/Istri PPK (gaji ke 13)	64,000	0	0	0	64,000
	000036. Belanja Tunjangan Suami/Istri PPK (gaji ke 14)	64,000	0	0	0	64,000
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	20,000	0	0	0	20,000
	000037. Belanja Tunjangan Anak PPPK	10,000	0	0	0	10,000
	000038. Belanja Tunjangan Anak PPPK (gaji ke 13)	5,000	0	0	0	5,000
	000039. Belanja Tunjangan Anak PPPK (gaji ke 14)	5,000	0	0	0	5,000
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	4,900,000	0	4,550,000	350,000	0
	000040. Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	4,200,000	0	3,850,000	350,000	0
	000041. Belanja Tunjangan Fungsional PPPK (gaji ke 13)	350,000	0	350,000	0	0
	000042. Belanja Tunjangan Fungsional PPPK (gaji ke 14)	350,000	0	350,000	0	0
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3,622,000	0	941,460	72,420	2,608,120
	000043. Belanja Tunjangan Beras PPPK	3,476,000	0	796,620	72,420	2,606,960
	000044. Belanja Tunjangan Beras PPPK (gaji ke 13)	73,000	0	72,420	0	580
	000045. Belanja Tunjangan Beras PPPK (gaji ke 14)	73,000	0	72,420	0	580
511628	Belanja Uang Makan PPPK	8,400,000	0	7,175,000	700,000	525,000
	000046. Belanja Uang Makan PPPK	8,400,000	0	7,175,000	700,000	525,000
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1,363,248,000	0	1,052,017,233	284,001,312	27,229,455
002.0A	Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran	476,781,000	0	374,258,400	101,918,300	604,300
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	418,463,000	0	352,537,400	65,892,300	33,300
	000047. Honorarium Sopir	44,196,000	0	36,830,000	7,366,000	0
	000048. Honorarium Satpam	88,392,000	0	73,660,000	14,732,000	0
	000049. Honorarium Pramubakti	200,880,000	0	167,400,000	33,480,000	0
	000050. THR Sopir	3,683,000	0	3,683,000	0	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
 *SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 401909 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Hal 4 dari 6

	Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024		SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini s.d. Periode %	
000051.	THR Satpam	7,366,000	0	7,366,000	100.00	0
000052.	THR Pramubakti	16,740,000	0	16,740,000	100.00	0
000053.	KEPERLUAN ALAT RUMAH TANGGA KANTOR	57,206,000	0	46,858,400	10,314,300 99.94 %	33,300
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	58,318,000	0	21,721,000	36,026,000 99.02 %	571,000
000054.	Biaya Keperluan sehari-hari perkantoran (pegawai 30 orang)	58,318,000	0	21,721,000	36,026,000 99.02 %	571,000
002.0B	Langganan Daya dan Jasa	212,530,000	0	209,905,737	1,989,290 99.70 %	634,973
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	189,000,000	0	189,000,000	100.00	0
000055.	Lisensi Vidio Conference	3,000,000	0	3,000,000	100.00	0
000056.	Langganan Internet	186,000,000	0	186,000,000	100.00	0
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,400,000	0	884,500	322,000 86.18 %	193,500
000057.	Belanja pengiriman surat dinas pos pusat	1,400,000	0	884,500	322,000 86.18 %	193,500
522112	Belanja Langganan Telepon	10,979,000	0	9,715,737	931,290 96.98 %	331,973
000058.	Langganan telpon	10,979,000	0	9,715,737	931,290 96.98 %	331,973
522113	Belanja Langganan Air	7,078,000	0	6,239,500	736,000 98.55 %	102,500
000059.	Langganan Air	7,078,000	0	6,239,500	736,000 98.55 %	102,500
522141	Belanja Sewa	4,073,000	0	4,066,000	7,000 99.83 %	7,000
000060.	Langganan Web Hosting	4,073,000	0	4,066,000	7,000 99.83 %	7,000
002.0C	Pemeliharaan Kantor	426,603,000	0	277,552,835	144,624,473 98.96 %	4,425,692
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	234,032,000	0	115,909,000	117,170,366 99.59 %	952,634
000061.	Pemeliharaan gedung dan Bangunan	234,032,000	0	115,909,000	117,170,366 99.59 %	952,634
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	192,571,000	0	161,643,835	27,454,107 98.20 %	3,473,058
000062.	Pemeliharaan AC VRV Outdoor (6 unit x 2 kali)	5,760,000	0	2,442,000	3,300,000 99.69 %	18,000
000063.	Perawatan Laptop	3,650,000	0	2,550,000	1,000,000 97.26 %	100,000
000064.	Pemeliharaan AC VRV Indoor (65 unit x 2 kali)	45,021,000	0	43,632,200	1,350,000 99.91 %	38,800
000065.	BBM Sewa Roda 4	24,500,000	0	20,449,630	3,250,000 96.73 %	800,370
000066.	Pemeliharaan kendaraan roda 4 (empat)	24,400,000	0	21,077,870	3,310,955 99.95 %	11,175

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG

Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Satuan Kerja : 401909 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Hal 5 dari 6

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024			SISA ANGGARAN	
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode %		
000067. Pemeliharaan Kendaraan roda 2 (dua)	6,000,000	0	5,556,331	356,352	5,912,683	98.54 %	87,317
000068. Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 (empat) Pinjam Pakai	71,600,000	0	63,682,104	7,686,800	71,368,904	99.68 %	231,096
000069. Perawatan Komputer	4,380,000	0	1,653,700	2,600,000	4,253,700	97.12 %	126,300
000070. Perawatan Printer	2,760,000	0	600,000	2,000,000	2,600,000	94.20 %	160,000
000071. Perawatan AC	4,500,000	0	0	2,600,000	2,600,000	57.78 %	1,900,000
002.0D Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor	65,188,000	0	56,162,000	8,992,000	65,154,000	99.95 %	34,000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	24,400,000	0	23,200,000	1,200,000	24,400,000	100.00	0
000072. Pakaian Dinas Honoror/pegawai tidak tetap	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	100.00	0
000073. Pakaian Dinas Pegawai	20,400,000	0	19,200,000	1,200,000	20,400,000	100.00	0
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	40,788,000	0	32,962,000	7,792,000	40,754,000	99.92 %	34,000
000074. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	15,470,000	0	12,818,000	2,652,000	15,470,000	100.00	0
000075. Honorarium Pengelola Keuangan Penerimaan PNPB	4,400,000	0	3,512,000	856,000	4,368,000	99.27 %	32,000
000076. Honorarium Pengelola Keuangan	7,524,000	0	6,384,000	1,140,000	7,524,000	100.00	0
000077. Honorarium Bendahara	3,696,000	0	3,080,000	616,000	3,696,000	100.00	0
000078. Honorarium Pejabat penguji SPP dan Penandatanganan SPM	4,224,000	0	3,520,000	704,000	4,224,000	100.00	0
000079. Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 1 ORG	5,474,000	0	3,648,000	1,824,000	5,472,000	99.96 %	2,000
002.0E Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim	105,840,000	0	84,420,000	13,860,000	98,280,000	92.86 %	7,560,000
522141 Belanja Sewa	105,840,000	0	84,420,000	13,860,000	98,280,000	92.86 %	7,560,000
000080. Sewa rumah dinas hakim	105,840,000	0	84,420,000	13,860,000	98,280,000	92.86 %	7,560,000
002.0H Koordinasi Ke Pusat/Tingkat Bandoing	62,896,000	0	40,018,261	9,237,249	49,255,510	78.31 %	13,640,490
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	62,896,000	0	40,018,261	9,237,249	49,255,510	78.31 %	13,640,490
000081. Uang Harian	40,098,000	0	28,090,000	3,310,000	31,400,000	78.31 %	8,698,000
000082. Transportasi	16,000,000	0	8,952,261	4,307,789	13,260,050	82.88 %	2,739,950
000083. Penginapan	6,798,000	0	2,976,000	1,619,460	4,595,460	67.60 %	2,202,540
002.0I Konsultasi Ke KPPN/Kanwil DJPb/KPKNL	13,410,000	0	9,700,000	3,380,000	13,080,000	97.54 %	330,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG

Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Satuan Kerja : 401909 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Hal 6 dari 6

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024		SISA ANGGARAN		
			Periode Lalu	Periode Ini		s.d. Periode	%
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13,410,000	0	9,700,000	3,380,000	13,080,000	97.54 %	330,000
000084. Transportasi	2,700,000	0	1,660,000	720,000	2,380,000	88.15 %	320,000
000085. Uang Harian	10,700,000	0	8,040,000	2,660,000	10,700,000	100.00	0
000086. Penginapan	10,000	0	0	0	0	0.00 %	10,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
 *SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : 03 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
 Satuan Kerja : 402017 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Hal 1 dari 3

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024		SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini s.d. Periode	
JUMLAH SELURUHNYA	169,310,000	0	137,204,375	30,340,466	1,765,159
BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	169,310,000	0	137,204,375	30,340,466	1,765,159
BF.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	169,310,000	0	137,204,375	30,340,466	1,765,159
BCA Perkara Hukum Perseorangan	141,310,000	0	113,871,045	25,673,800	1,765,155
BCA.U03 Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Barat	141,310,000	0	113,871,045	25,673,800	1,765,155
051 Pendaftaran Berkas Perkara	71,315,000	0	54,465,845	16,603,000	246,155
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	71,315,000	0	54,465,845	16,603,000	246,155
521211 Belanja Bahan	21,820,000	0	15,148,720	6,484,000	187,280
000001. Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara	21,820,000	0	15,148,720	6,484,000	187,280
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	49,495,000	0	39,317,125	10,119,000	58,875
000002. Alat Tulis Kantor	49,495,000	0	39,317,125	10,119,000	58,875
052 Penetapan hari sidang	90,000	0	80,000	0	10,000
052.0A TANPA SUB KOMPONEN	90,000	0	80,000	0	10,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	90,000	0	80,000	0	10,000
000003. Pengiriman Penetapan Hari Sidang (Kejaksanaan)	90,000	0	80,000	0	10,000
053 Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan.	19,300,000	0	18,276,240	656,000	367,760
053.0A TANPA SUB KOMPONEN	19,300,000	0	18,276,240	656,000	367,760
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,800,000	0	1,476,240	16,000	307,760
000004. Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	1,800,000	0	1,476,240	16,000	307,760
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17,500,000	0	16,800,000	640,000	60,000
000005. Pengiriman surat penahanan dan Perpanjangan Penahanan	17,500,000	0	16,800,000	640,000	60,000
055 Pengiriman Petikan/ Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa	16,720,000	0	13,702,750	2,754,000	263,250
055.0A TANPA SUB KOMPONEN	16,720,000	0	13,702,750	2,754,000	263,250
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,500,000	0	1,222,750	34,000	243,250
000006. Pengiriman Petikan/Salinan Putusan	1,500,000	0	1,222,750	34,000	243,250

*1 Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
 *SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2024

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG

Unit Organisasi : 03 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Satuan Kerja : 402017 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Hal 2 dari 3

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024		SISA ANGGARAN	
			Periode Lalu	Periode Ini s.d. Periode		%
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15,220,000	0	12,480,000	2,720,000	15,200,000 99.87 %	20,000
000007. Pengiriman Petikan/Salinan Putusan (Pegawai)	15,220,000	0	12,480,000	2,720,000	15,200,000 99.87 %	20,000
056 Minutasi/Upaya hukum	24,585,000	0	21,069,000	3,500,000	24,569,000 99.93 %	16,000
056.0A TANPA SUB KOMPONEN	24,585,000	0	21,069,000	3,500,000	24,569,000 99.93 %	16,000
521211 Belanja Bahan	24,585,000	0	21,069,000	3,500,000	24,569,000 99.93 %	16,000
000008. Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara	24,585,000	0	21,069,000	3,500,000	24,569,000 99.93 %	16,000
057 Penanganan perkara banding di Pengadilan Tingkat pertama	7,100,000	0	4,892,140	1,774,800	6,666,940 93.90 %	433,060
057.0A TANPA SUB KOMPONEN	7,100,000	0	4,892,140	1,774,800	6,666,940 93.90 %	433,060
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2,600,000	0	1,052,140	1,134,800	2,186,940 84.11 %	413,060
000009. Pengiriman Salinan Putusan	2,600,000	0	1,052,140	1,134,800	2,186,940 84.11 %	413,060
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,500,000	0	3,840,000	640,000	4,480,000 99.56 %	20,000
000010. Pemberitahuan Proses Banding Kepada Jaksa/Terdakwa	2,900,000	0	2,480,000	400,000	2,880,000 99.31 %	20,000
000011. Pemberitahuan Putusan Banding	1,600,000	0	1,360,000	240,000	1,600,000 100.00	0
058 Penanganan perkara kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat pertama	2,200,000	0	1,385,070	386,000	1,771,070 80.50 %	428,930
058.0A TANPA SUB KOMPONEN	2,200,000	0	1,385,070	386,000	1,771,070 80.50 %	428,930
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	900,000	0	585,070	66,000	651,070 72.34 %	248,930
000012. Pengiriman Berkas Kasasi dan PK	900,000	0	585,070	66,000	651,070 72.34 %	248,930
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,300,000	0	800,000	320,000	1,120,000 86.15 %	180,000
000013. Pemberitahuan Putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali	650,000	0	160,000	320,000	480,000 73.85 %	170,000
000014. Pemberitahuan Proses Kasasi/PK kepada Jaksa/Terdakwa/Penasehat Hukum	650,000	0	640,000	0	640,000 98.46 %	10,000
QBA Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	28,000,000	0	23,333,330	4,666,666	27,999,996 100.00	4
QBA.032 Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum	28,000,000	0	23,333,330	4,666,666	27,999,996 100.00	4
051 Pos Bantuan Hukum	28,000,000	0	23,333,330	4,666,666	27,999,996 100.00	4
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	28,000,000	0	23,333,330	4,666,666	27,999,996 100.00	4
522131 Belanja Jasa Konsultan	28,000,000	0	23,333,330	4,666,666	27,999,996 100.00	4

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : 03 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
 Satuan Kerja : 402017 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Periode Lalu	Realisasi TA 2024	SISA
				Periode Ini s.d. Periode	ANGGARAN
000015. Honor Advokat Piket	28,000,000	0	23,333,330	4,666,666	27,999,996
				100.00	4

Hal 3 dari 3

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
 *SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir